



Kementerian
Pendidikan Dasar
dan menengah



LAPORAN KINERJA

2024

Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2024. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2024 menetapkan 3 sasaran dan 4 indikator kinerja. Secara umum Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya masih terjadi ketidakkonsistenan antara rencana yang dibuat dengan pelaksanaannya. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2024.



Bogor, 30 Januari 2025

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



Dora Amalia

Dr. Dora Amalia

NIP 197107292002122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafis	v
Ikhtisar Eksekutif.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Gambaran Umum.....	1
B Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis	6
E. Peran Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. PProgram Prioritas.....	10
C. Rencana Kinerja dan Anggaran.....	12
D. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Program dan Agenda Prioritas	45
C. Realisasi Anggaran.....	45
D. Kinerja Lain-lain.....	47
E. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	52
BAB IV PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Fokus Perbaikan.....	62
Lampiran	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kantor Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1
Gambar 1.2 Perkembangan nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1
Gambar 1.3 Kegiatan Mancakrida di Taman Safari 3	
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	6
Gambar 3.1 Program Prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	11
Gambar 4.1 Tampilan Baru KBBI VI Daring	19
Gambar 4.2 Rekreutmen Editor KBBI Daring 2024	20
Gambar 4.3 Tampilan platform Lexonomy	21
Gambar 4.4 Kegiatan Sidang Komisi Istilah	23
Gambar 4.5 Cover Kamus Bidang Ilmu	24
Gambar 4.6 Cover Kamus Etimologi	24
Gambar 4.7 Tampilan halaman depan SIPEBI	25
Gambar 4.8 Cover Buku Komik	27
Gambar 4.9 Cover Buku Cerita bergambar	28
Gambar 4.10 Pengguna KBBI dari luar negeri	29
Gambar 4.11 Kegiatan Konsinyasi Inventarisasi Kosakata	31
Gambar 5.1 Cover Juknis Konservasi Manuskrip	34
Gambar 5.2 Cover Pedoman Konservasi Bahasa	35
Gambar 5.3 Cover Juknis Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah	35
Gambar 5.4 Cover Rencana Induk Peta Kebinekaan	36
Gambar 5.5 Cover Risalah Kebijakan	36
Gambar 5.6 Cover Juknis Regbastra	37
Gambar 5.7 Cover Model Digitalisasi Pemetaan Sastra	37
Gambar 5.8 Cover Juknis FFPBD	39
Gambar 6.1 Perkembangan nilai SAKIP	43
Gambar 7.1 Perkembangan DIPA Tahun Anggaran 2024	46
Gambar 8.1 Penampilan Penerima Bantuan Pemerintah	49
Gambar 8.2 Acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2024	50
Gambar 8.3 Rapat Koordinasi Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah	51
Gambar 9.1 Piagam Ucapan Terima Kasih terkait pelibatan kegiatan inventarisasi kosakata	53
Gambar 9.2 Piagam Ucapan Terima Kasih untuk Laboratoium Kebinekaan	53
Gambar 10.1 Kegiatan Konsinyasi III Inventarisasi kosakata	54
Gambar 10.2 Pertemuan dengan tim OUP dan Lexicom	54
Gambar 10.3 Pembahasan Pemutakhiran VIBA Berbasis AI oleh STIS	56
Gambar 10.4 Visual Peta Digital	57
Gambar 10.5 Kegiatan penyusunan Korpus Indonesia	57
Gambar 10.6 Kunjungan untuk melihat manuskrip	58
Gambar 10.7 Diskusi Penyusunan Produk Pemodernan Sastra	59
Gambar 10.8 Pameran Produk Pemodernan Sastra di acara Comic Con	60
Gambar 10.9 kunjungan Wakil Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif, Irene Umar	60
Gambar 10.11 Peluncuran Produk Pemodernan Sastra	61
Gambar 10.12 Kegiatan Penyusunan Bahan Pengayaann Labolatorium Kebinekaan	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan dan Langkah Antisipasi Secara Umum	ix
Tabel 2.1 Data pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2020--2024.....	2
Tabel 3.1 Tujuan Kemendikbudristek Terkait Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan	8
Tabel 3.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9
Tabel 3.3 Matriks Renstra 2020–2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020	9
Tabel 3.4 Matrix Renstra 2022–2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022	10
Tabel 3.5 Program Prioritas Nasional dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	11
Tabel 3.6 Rencana Kerja Anggaran tahun 2024	12
Tabel 3.7 Matriks Rencana Strategis dan Perjanjian kinerja Tahun 2020–2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020	13
Tabel 3.8 Matriks Rencana Strategis dan Perjanjian kinerja Tahun 2022–2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022	14
Tabel 3.9 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2024	14
Tabel 4.1 Capaian kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2024	16
Tabel 4.2 Target dan Realisasi IKK Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	17
Tabel 4.3 Matriks entri KBBI dan tiap Balai/Kantor	21
Tabel 4.4 Matriks entri tiap Seranai Istilah	23
Tabel 4.5 Matriks Komik dan Ceita Bergambar.....	28
Tabel 4.6 Unsur Pentahelix	29
Tabel 4.7 Hambatan,Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi	31
Tabel 5.1 Target dan Realisasi IKK Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra	33
Tabel 5.2 Hambatan,Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi	40
Tabel 6.1 Target dan Realisasi IKK Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	41
Tabel 7.1 Target dan Realisasi IKK Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	43
Tabel 8.1 Matriks Program Prioritas Nasionala dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	45
Tabel 9.1 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja.....	46
Tabel 9.2 Realisasi Anggaran per KRO	46

DAFTAR GRAFIS

Grafik 1.1 Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020--2024.....	2
Grafik 2.1 Jumlah pegawai berdasarakan pendidikan.....	2
Grafik 3.1 Tren Alokasi dan Realisasi Anggarn tahun 2020--2024	31
Grafik 4.1 Tren Pningkatan jumlah entri KBBI 2020--2024	19
Grafik 4.2 Tren penambahan entri KBBI selama kegiatan Konsinyasi Inventarisasi Kosakata 1--15 dan dari Lexicom.....	20
Grafik 5.1 Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.....	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2024 menyajikan tingkat capaian tiga sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja secara detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2024 adalah sebagai berikut

Capaian Tahun 2020--2021 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

[SK 1.0] Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

[IKK 1.1] Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia

	Target	Realisasi	Persentase
2020	16.000	15.599	97%
2021	21.287	27.048	97%

[SK 2.0] Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

[IKK 2.1] Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)

	Target	Realisasi	Persentase
2020	4	4	100%
2021	4	4	100%

[IKK 2.2] Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan

	Target	Realisasi	Persentase
2020	3	3	100%
2021	7	8	114%

[IKK 2.3] Jumlah bahan ajar kebahasaan

	Target	Realisasi	Persentase
2020	3	3	100%
2021	7	8	114%

[IKK 2.4] Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian

	Target	Realisasi	Persentase
2020	38	39	102%
2021	51	51	100%

[SK 3.0] Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan

[IKK 3.1] Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan

	Target	Realisasi	Persentase
2020	112	120	107%
2021	112	204	182%

[IKK 3.2] Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

	Target	Realisasi	Persentase
2020	220	221	101%
2021	220	279	126%

[IKK 3.3] Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan

	Target	Realisasi	Persentase
2020	50	50	152%
2021	25	38	126%

[SK 4.0] Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah

[IKK 4.1] Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah

	Target	Realisasi	Persentase
2020	500	424	84%
2021	500	600	120%

[IKK 4.2] Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah

	Target	Realisasi	Persentase
2020	500	385	77%
2021	500	300	60%

[IKK 4.3] Jumlah produk kesastraan terkembangkan

	Target	Realisasi	Persentase
2020	4	4	100%
2021	30	30	100%

[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

[IKK 5.1] Predikat SAKIP Satker minimal BB

	Target	Realisasi	Persentase
2020	BB	A	120%
2021	BB	A	120%

[IKK 5.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91

	Target	Realisasi	Persentase
2020	91	94.04	103%
2021	92	90.75	97%

Capaian Tahun 2022--2024

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

[SK 1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

	Target	Realisasi	Persentase
2022	39	42	107%
2023	41	50	121%
2024	181	185	102%

[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah

[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah

	Target	Realisasi	Persentase
2022	6	6	100%
2023	6	7	116%
2024	8	10	125%

[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

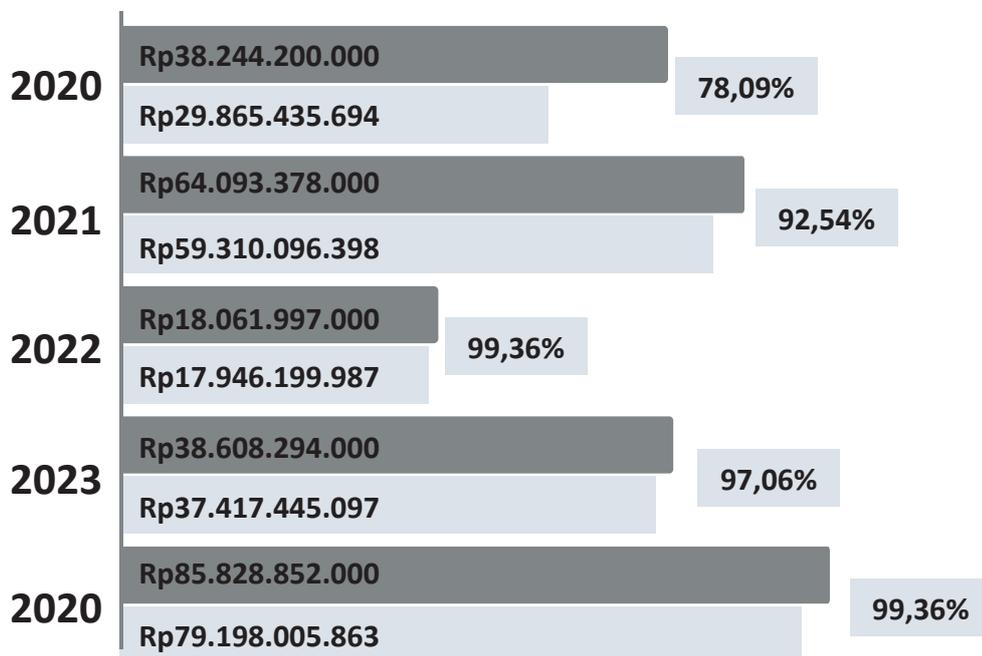
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

	Target	Realisasi	Persentase
2022	BB	A	120%
2023	BB	A	120%
2024	A	A	100%

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

	Target	Realisasi	Persentase
2022	91	92,31	101%
2023	91	91,81	101%
2024	91.85	96.06	104%

Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020--2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



Grafik 1.1 Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020--2024

Permasalahan dan Langkah Antisipasi Secara Umum

Tabel 1.1 Permasalahan dan Langkah Antisipasi Secara Umum

Permasalahan	Langkah Antisipasi
Penyusunan dan pedoman yang menjadi tagihan utama tertunda karena penyelesaian program lain yang anggaran yang lebih besar dan berkaitan langsung dengan masyarakat.	Menyusun lini masa yang tegas dan berkoordinasi dengan tim untuk pembagian tugas supaya pengerjaan juknis dan pedoman lebih efisien.
Dilaksanakannya dua kegiatan besar yakni evaluasi Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) dan Rapat Koordinasi sehingga sulit membagi peran dan tugas anggota tim. Beban kerja terlalu besar dan tidak dapat fokus karena harus melaksanakan dua kegiatan bersamaan.	Berkoordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan bakan (kepala dan stafnya) dalam perencanaan FTBIN serta melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan FTBIN berikutnya.
Pengerjaan Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (Sipebi) terpaksa dikesampingkan karena ada target pekerjaan yang lebih prioritas.	pengerjaan diintensifkan di triwulan III dengan melibatkan bantuan mahasiswa
Terdapat hasil pekerjaan kolaboratif antara pusat dan UPT yang tidak bisa dihitung sebagai capaian SKP.	Berkoordinasi dengan Sekretariat Badan untuk membuat cascading terkait pekerjaan utama di luar Perjanjian Kinerja Kepala Satker UPT

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum



Gambar 1.1 Kantor Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa). Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pertama kali dibentuk pada bulan Desember tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 dengan nama Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Pada tahun 2019 terjadi kembali perubahan nomenklatur menjadi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan disahkan melalui Permendikbud Nomor 9 tahun 2019.

Perkembangan Nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



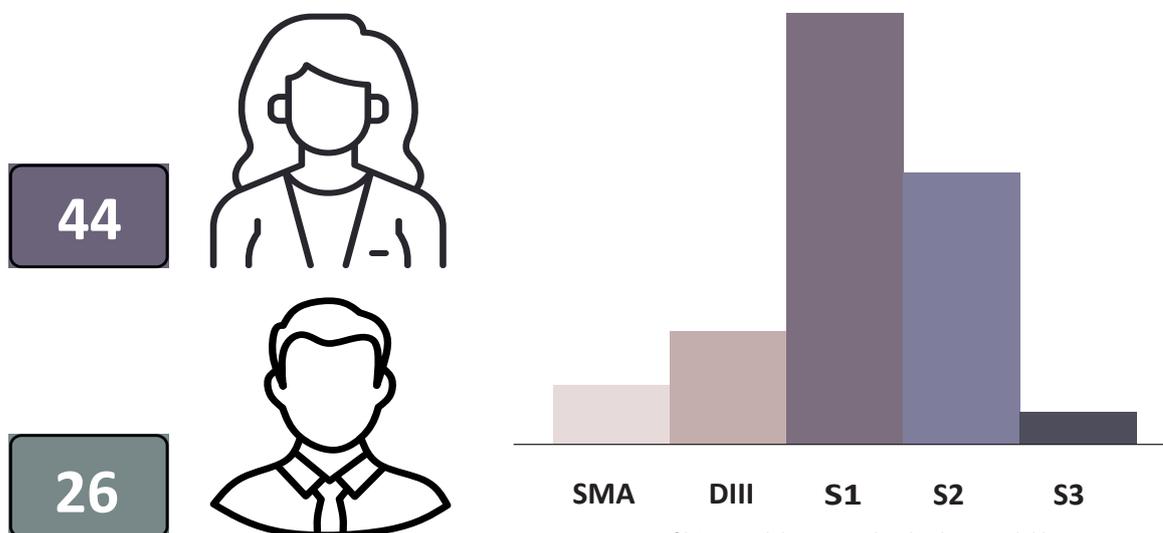
Gambar 1.2 Perkembangan nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pada tahun 2022–2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dipimpin oleh Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan jumlah SDM sebanyak 70 pegawai (65 PNS, 1 PPPK dan 4 PPNPN). Untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan rincian tugas melaksanakan analisis pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Untuk itu dalam mewujudkan kinerja pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dengan hasil maksimal dibutuhkan kelompok jabatan administrasi (JA), jabatan fungsional (JF), dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan profesionalisme maka Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membentuk 7 KKLP (Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional) yang menaungi jabatan teknis. Pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdapat dua tim kerja, yaitu (1) Tim Perkamusan dan Peristilahan serta (2) Tim Pelindungan dan Pemodernan yang setiap kelompok kepakarannya menaungi staf teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pelindungan secara profesional. Keanggotaan kelompok kepakaran ini terdiri atas tenaga fungsional khusus dan nonfungsional (pelaksana) teknis, baik yang berada di Pusat maupun yang tersebar di 30 UPT Balai/Kantor di seluruh Indonesia. Sementara itu, berkaitan erat dengan tugas analisis pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra mulai tahun 2023 tugas tersebut dialihkan pada jabatan fungsional baru, yaitu Widyabasa. Jabatan fungsional Widyabasa memiliki tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Tugas analisis tersebut dilaksanakan sebelumnya oleh jabatan peneliti yang sudah beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional mulai 2022

Tabel 2.1 Data pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2020–2024

	Data Pegawai 2020–2024				
	2020	2021	2022	2023	2024
PNS	149	143	70	68	65
PPPK	-	-	-	-	1
PPNPN	37	35	10	9	4
TOTAL	196	178	80	77	70



Grafik 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



Gambar 1.3 Kegiatan Mancakrida di Taman Safari

B. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa Dan Kantor Bahasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
14. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas untuk

“Melaksanakan Penyiapan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra”

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan fungsi:

1.	Penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
2.	Pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
3.	Pengelolaan kebinekaan bahasa;
4.	Pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra;
5.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
6.	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
7.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
8.	Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam rangka meningkatkan kinerja, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merujuk pada selogan atau moto Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu

Bermartabat Badan pengembangan dan pembinaan bahasa adalah lembaga yang memiliki wibawa dan marwah yang tinggi dan memiliki tugas yang sangat besar dan mulia, yakni mengawal salah satu identitas bangsa yaitu bahasa

Bermanfaat Keberadaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas

Badan Bahasa Bermanfaat-Bermartabat memiliki nilai filosofis yang mengarah kepada wujud kebanggaan terhadap lembaga karena marwahnya dan nilai kebanggaan terhadap lembaga ini untuk masyarakat. Dengan demikian, semua pegawai akan melakukan hal yang terbaik untuk lembaganya

“Kesatria” sebagai budaya Organisasi Badan Bahasa

Usaha mencapai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) yang Bermartabat-Bermanfaat dan untuk lebih terarahnya transformasi yang sedang dilakukan, Badan Bahasa merumuskan hal-hal yang harus diperbaiki, yaitu mencangkup pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, yang diimplementasikan dalam sebuah budaya organisasi. Budaya Organisasi ini merupakan karakteristik dalam sebuah budaya organisasi dan seluruh pegawai dan menjadi standar etik organisasi sekaligus sebagai pembeda dengan organisasi yang lain

Budaya Organisasi Badan Bahasa digambarkan dalam sosok “kesatria” untuk menciptakan landasan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Kesatria Badan Bahasa dalam budaya kerjanya dapat diartikan sebagai individu yang tidak hanya memiliki keterampilan dan keahlian profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan, tetapi juga menonjol dalam integritas, kreatif dan inovatif, berani dan bertanggungjawab, adil serta terus belajar. Nilai-nilai tersebut dapat diuraikan dalam makna-makna budaya kerja berikut.

Berintegritas

bermakna memiliki integritas tinggi, mematuhi prinsip-prinsip etik, dan selalu berusaha untuk bertindak dengan kejujuran serta menunjukkan keberanian untuk berdiri teguh pada nilai-nilai moral, bahkan dalam situasi yang sulit

Kreatif dan Inovatif

Kreatif dan Inovatif bermakna memiliki kemampuan untuk menemukan gagasan-gagasan baru, menciptakan strategi terbaik dan tepat untuk mewujudkan gagasannya, serta tidak akan pernah kehabisan akal untuk melakukan hal terbaik.

Berani dan Bertanggung Jawab

bermakna memiliki keberanian yang didorong oleh keyakinan akan kebenaran dan senantiasa siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang diambilnya secara profesional.

Adil

bermakna berusaha menciptakan suasana yang adil dan seimbang dalam melayani, menghargai perbedaan, mempromosikan keharmonisan dalam bekerja, dan menanggapi setiap situasi dengan bijaksana, serta menekankan pentingnya pengelolaan konflik dengan cara yang positif dan konstruktif.

Terus Belajar

bermakna mendorong pemberdayaan diri dan orang lain, mendukung pertumbuhan kolektif tim, dan selalu terbuka terhadap pembelajaran baru serta berusaha untuk menjadi agen perubahan yang positif.

Sehubungan dengan hal itu, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) bertekad untuk melakukan langkah-langkah pembenahan dalam tata kelola satuan kerja berintegritas, membangun budaya kerja dan pola kerja yang mengimplementasikan tujuh tata nilai budaya kerja Kemendikbud, yaitu “IKITAMPI” integritas, kreatif dan inovatif, tanpa pamrih, aktif, meritokrasi, pembelajar, serta inisiatif; serta pola pikir pegawai yang lebih jujur, peduli, mandiri, bertanggung jawab, suka bekerja keras, sederhana, berani dan adil dalam melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat. Di samping itu, perlunya meneguhkan nilai utama ASN “ber-AKHLAK” dan employer branding “Bangga Melayani Bangsa” serta nilai organisasi Pusbanglin sendiri, yakni “Spir-it” simpatik, profesional, berintegritas, reliabel, inovatif, dan transparan.

Dampak Perubahan Budaya Kerja

Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja serta pengimplementasian dari selogan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, menghasilkan dampak perubahan budaya kerja sebagai berikut

- Dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara rutin tiap triwulan
- Peningkatan kedisiplinan pegawai dilihat dari semakin sedikitnya jumlah pegawai yang terlambat
- Peningkatan implementasi AKIP ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Struktur Organisasi

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdiri atas satu Kepala Pusat (eselon II), satu Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagan struktur organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

D. Isu Strategis

1.	Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, istilah-istilah dalam bidang ilmu bertambah kian cepat. Keahlian dalam bidang yang semakin lama semakin spesifik menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan terencana dan terstruktur.
2.	Semakin masifnya perkembangan teknologi menuntut keamanan, kecepatan, kelengkapan, kemudahan, dan kenyamanan untuk mengakses kebutuhan produk-produk kebahasaan secara digital. Pelindungan bahasa daerah menjadi isu penting dan mulai mendapat perhatian internasional ketika bahasa-bahasa di dunia mulai banyak yang punah.
3.	Bahasa daerah di Indonesia saat ini banyak yang mengalami penurunan status daya hidupnya. Hal ini dipengaruhi tiga faktor. Pertama, sikap bahasa penutur jati bahasa daerah, khususnya generasi muda, terhadap bahasa daerahnya mengalami penurunan. Kedua, adanya migrasi dan mobilitas yang tinggi masyarakat penutur bahasa daerah. Ketiga, kawin silang antaretnis (amalgamasi).

4.	Sastra di Indonesia banyak yang mulai terancam punah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor internal yang berkaitan dengan eksistensi maestro, pewaris, penerus, pelaku, dan khalayak sastra lisan yang semakin berkurang.
5.	Sastra tradisional kurang dikenal oleh masyarakat karena media yang digunakan masih konvensional dan dituturkan secara turun-menurun.

E. Peran Strategis

1.	Mendukung terwujudnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2045. Upaya ini direalisasikan dengan program pemerayaan kosakata bahasa Indonesia melalui percepatan penambahan entri KBBI menjadi 200.000 entri.
2.	Berkomitmen untuk terus mengimbangi perkembangan teknologi yang disertai dengan bertambahnya istilah-istilah dalam bidang ilmu yang kian cepat dan spesifik. Upaya ini direalisasikan dengan penyusunan kamus bidang ilmu dan kamus etimologi termutakhir.
3.	Melakukan inovasi dan pemutakhiran pada aplikasi produk-produk kebahasaan
4.	Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) melalui akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
5.	Berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra di Nusantara.
6.	Berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
7.	Berperan penting dalam melakukan pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra.
8.	Berperan penting dalam menyediakan produk-produk kebahasaan dan kesastraan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi

VISI Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020—2024 melalui bahasa dan sastra dan mendukung visi Presiden Republik Indonesia yaitu

“mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Misi

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

- Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
- Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
- Mewujudkan kelestarian bahasa daerah
- Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berfokus pada tujuan Strategis Kemendikbudristek, terutama dalam pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan

Tabel 3.1 Tujuan Kemendikbudristek Terkait Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan 2024
Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	81
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,70
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87

Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan dan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target Renstra 2024
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	72 (Persen)
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91,99 (Persen)
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia	50 Negara
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	20.54 (Indeks)
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A (Predikat)
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	4

Matriks Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020--2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 3.3 Matriks Renstra 2020–2021
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target	
		2020	2021
SK	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia		
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	16.000	21287
SK	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia		
IKK	Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	4	7
IKK	Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	3	7
IKK	Jumlah bahan ajar kebahasaan	7	7
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	38	51

SK	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan		
IKK	Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	112	112
IKK	Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	220	220
IKK	Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	50	25
SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah		
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	1.500	500
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	1.500	500
IKK	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	4	30
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	91	92

Kemudian sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020--2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 3.4 Matrix Renstra 2022–2024
 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target		
		2022	2023	2024
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra			
IKK	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	40	41	43
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra			
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra	6	6	8
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91	91	91

B. Program Prioritas

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mendukung program prioritas Kementerian melalui program Merdeka Belajar turut serta melaksanakan Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Program Prioritas Badan Bahasa dilaksanakan dengan mengacu pada

arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama dalam mewujudkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kebijakan diarahkan pada tiga fokus utama sebagai berikut.



Gambar 3.1 Program Prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020--2024 dan mendukung program kementerian melalui Program Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah dan Episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk literasi Indonesia, dan juga mendukung tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki satu kegiatan atau rincian output (RO) berstatus prioritas nasional yang turut mendukung program prioritas nasional dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

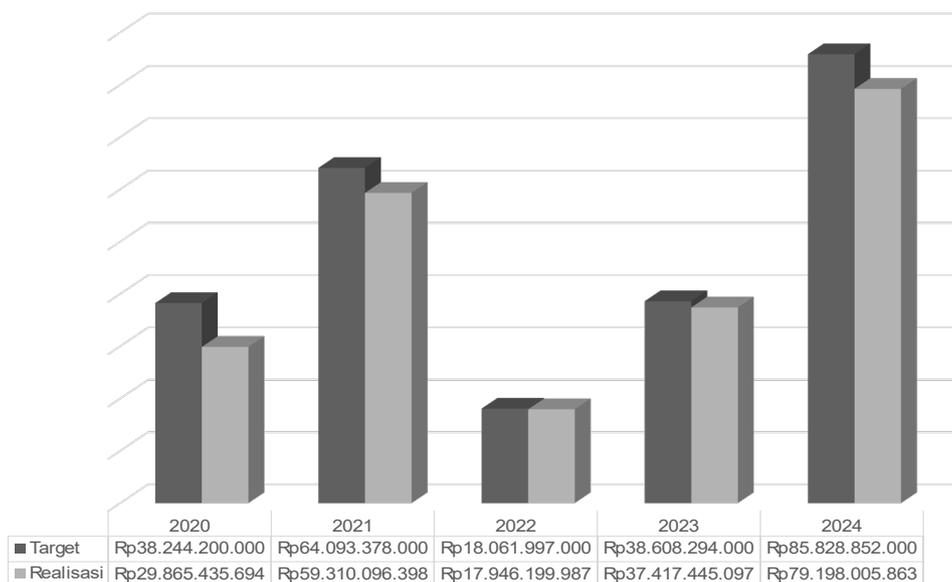
Tabel 3.5 Program Prioritas Nasional dan Rincian Output Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Program Prioritas Nasional	Rincian Output	
1	Penguatan Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[2021.QMA.001] Produk Kodifikasi Bahasa	
Program Prioritas Badan Bahasa	Rincian Output	Target	Pagu
Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[2021.QMA.001] Produk Kodifikasi Bahasa	9	19.619.474.000

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020--2024 dan mendukung program kementerian melalui Program Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah, dan juga mendukung tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki satu kegiatan atau rincian output (RO) berstatus prioritas nasional yang turut mendukung program prioritas nasional dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Produk Kodifikasi Bahasa yang melaksanakan kegiatan pembuatan produk kodifikasi bahasa, seperti Pemutakhiran data entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuatan Kamus Etimologi dan Kamus Bidang Ilmu, serta pemutakhiran aplikasi pendukung yaitu SIPEBI.

C. Rencana Kinerja dan Anggaran

Grafik 3.1 Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2020–2024



Tren alokasi anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra selama 5 tahun terakhir bersifat fluktuasi dimana pada tahun 2021 mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp25.849.178.000 atau sekitar 68%, namun di tahun 2022 turun sebesar Rp46.031.381.000 atau sekitar 72%, kemudian di tahun 2023 alokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp20.546.297.000 atau sekitar 114% dan pada tahun 2024 alokasi anggaran mengalami kenaikan terbesar selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp47.220.558.000 atau sekitar 122% dari tahun 2023.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 3.6 Rencana Kerja Anggaran tahun 2024

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target Triwulanan			
			I	II	III	IV
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Produk	0	0	5	181
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra					
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra	Model	1	4	7	8
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	-	-	-	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	0	0	0	91.85

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Tahun 2020–2024 menetapkan sasaran, indikator, dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 3.7 Matriks Rencana Strategis dan Perjanjian kinerja Tahun 2020–2021
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target Renstra		Target PK	
			2020	2021	2020	2021
SK	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia					
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	130.030	147.522	16.000	21.287
SK	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia					
IKK	Jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)	Baterai	22	27	4	7
IKK	Jumlah acuan kebahasaan dan kesastraan	Naskah	18	25	3	7
IKK	Jumlah bahan ajar kebahasaan	Naskah	89	96	7	7
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	43	32	38	51
SK	Meningkatnya jumlah partisipan aktif dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan					
IKK	Jumlah lembaga terfasilitasi secara kebahasaan	Lembaga	323	435	112	112
IKK	Jumlah pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	993	1.213	220	220
IKK	Jumlah bahan pengayaan laboratorium kebahasaan	Bahan	50	75	50	25
SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah					
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	Orang	17.000	25.000	1.500	500
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	17.000	25.000	1.500	500
IKK	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	Sastra	6	10	4	30
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
IKK	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	92	91	92

Tabel 3.8 Matriks Rencana Strategis dan Perjanjian kinerja Tahun 2022–2024
 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target Renstra			Target PK		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra							
IKK	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Produk	40	41	43	36	41	181
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra							
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra	Model	6	6	8	9	6	8
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa							
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91	91	91	91	91	91.85

Pada tahun 2024 sebagian besar Target Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ditetapkan melebihi target Renstra, hal ini disebabkan adanya rekomendasi terkait peningkatan target Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun 2023 yang melebihi target pada tahun tersebut. Peningkatan target pada Perjanjian Kinerja 2024 meliputi, Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra sebanyak 181 produk dan target Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menjadi A. Sementara itu, Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang ditetapkan pada Renstra 2024 sebelumnya adalah 43 produk, sedangkan target Predikat SAKIP ditetapkan adalah BB. Selain itu, target Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ditetapkan di PK menjadi 91.85 dari target Renstra 91 saja

Tabel 3.9 Perjanjian Kinerja
 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2024

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra		
IKK	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Produk	181
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra		
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra	Model	8
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	A

IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91.85
-----	--	-------	-------

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9.519.915.000
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	29.364.379.000

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan penyesuaian target/anggaran melalui revisi Perjanjian Kinerja tahun 2024. hal tersebut disebabkan adanya

1. Pengalihan kelebihan belanja pegawai ke Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Buka blokir Automatic Adjustmen
3. Pengalihan belanja modal ke Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
4. Kebijakan Pemblokiran Anggaran Perjalanan Dinas 50%

Berdasarkan hal tersebut Pagu Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengalami perubahan. Pagu anggaran DIPA awal sebesar Rp98.388.516.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp85.828.852.000,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja kegiatan, dengan tingkat ketercapaian selama tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 4.1 Capaian kinerja
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2024

Kode	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra				
IKK	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Produk	181	185	102%
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra				
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra	Model	8	10	125%
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	A	A	100%
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91.85	96.06	104%

1. Sasaran Kegiatan I

Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang terukur melalui indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2024 yang meningkat, serta partisipan pelindungan bahasa dan sastra yang ikut meningkat, terus mendorong peningkatan literasi kebahasaan dan ke-sastraan di Indonesia. Hal ini juga direpresentasikan oleh penutur Bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas bahasanya. Capaian ini perlu didukung dan dikembangkan, salah satunya melalui penyediaan produk pengembangan Bahasa.

Produk pengembangan bahasa yang dimaksud adalah produk hasil kodifikasi bahasa yang disusun untuk menjadi acuan penutur bahasa Indonesia. Tersedianya produk pengembangan bahasa dapat dicapai dengan berbagai upaya seperti inventarisasi kosakata, penyusunan kamus dan acuan kebahasaan, serta integrasi kosakata dengan TIK. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi maju untuk terus menjaga stabilitas ketersediaan sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan kualitas ketersediaan produk pengembangan bahasa sehingga dapat men-

jadi alat untuk menyamakan persepsi terkait kebahasaan serta sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tahun 2024, Tim Perkamusan dan Peristilahan telah menghasilkan satu KBBI termutakhirkan, senarai Istilah sidang komisi istilah, empat kamus bidang ilmu, tiga kamus etimologi, dan satu produk integrasi kosakata dengan TIK, dan dua produk pedoman kebahasaan. Selain produk pengembangan bahasa, Pusbanglin juga melaksanakan penyediaan produk pengembangan sastra. Pengembangan sastra merupakan upaya untuk menggali, memperluas, dan menginterpretasikan karya sastra yang tersedia atau menciptakan karya baru yang terinspirasi dari karya-karya yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menjaga, melestarikan, dan mengenalkan sastra kepada masyarakat secara menarik. Pengembangan sastra bertujuan untuk menjaga keberlanjutan apresiasi terhadap karya sastra, mendorong kreativitas, dan menyediakan produk pemodernan sastra agar dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

Tersedianya produk pengembangan sastra dilakukan melalui pemodernan karya sastra. Pemodernan sastra dalam bentuk komik cerita rakyat dari 38 provinsi dan judul cerita bergambar bersumber dari manuskrip Hikayat Raja Budak telah menghasilkan 175 produk berupa 114 judul komik cerita rakyat dari 38 provinsi dan 61 judul cerita bergambar yang bersumber dari manuskrip Hikayat Raja Budak. Dengan demikian seluruh jumlah yang berhasil dikembangkan dalam produk pengembangan sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) pada tahun anggaran 2024 sebanyak 185 produk. Selain mengembangkan produk, Pusbanglin juga memberikan fasilitasi kepada para pelaku sastra, baik kelompok (komunitas) maupun perseorangan melalui program Bantuan Pemerintah

1.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Tabel 4.2 Target dan Realisasi IKK
Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		2022	2023	Tahun 2024			Renstra		
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	42	50	181	185	102%	43	185	430%

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan

di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Metode penghitungan indikator kinerja jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra adalah dengan menghitung jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu. Pada tahun 2024 indikator jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra didukung oleh kegiatan dari produk kodifikasi bahasa dan produk pengembangan sastra.

$$PPBS = \sum P$$

Keterangan:

PPBS = Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

P = Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Realisasi IKK jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 181 produk telah terealisasi sebanyak 185 produk dengan persentase capaian sebesar 102%. 10 produk tersebut dihasilkan dari Kodifikasi Bahasa:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring
- Senarai Istilah Sidang Komisi Istilah
- Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Diplomasi Pertahanan
- Kamus Bidang Ilmu Komunikasi Subbidang Hubungan Masyarakat
- Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Kurikulum
- Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Pengajaran dan Pembelajaran
- Kamus Etimologi Bahasa Belanda
- Kamus Etimologi Bahasa Inggris
- Kamus Etimologi Bahasa Jepang
- Aplikasi Sipebi

Di samping 10 produk pengembangan bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga menghasilkan 175 produk pengembangan sastra dalam bentuk alih wahana berupa 114 judul komik cerita rakyat dari 38 provinsi dan 61 judul cerita bergambar yang bersumber dari manuskrip Hikayat Raja Budak.

Analisis program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja, yaitu sebagai berikut.

Produk Pengembangan Bahasa

Pada tahun 2024 Tim Perkamusan dan Peristilahan telah menghasilkan satu kamus bahasa Indonesia yang termutakhirkan, yaitu KBBI Daring edisi 6, empat kamus bidang ilmu, tiga kamus etimologi, serta dua produk pedoman kebahasaan

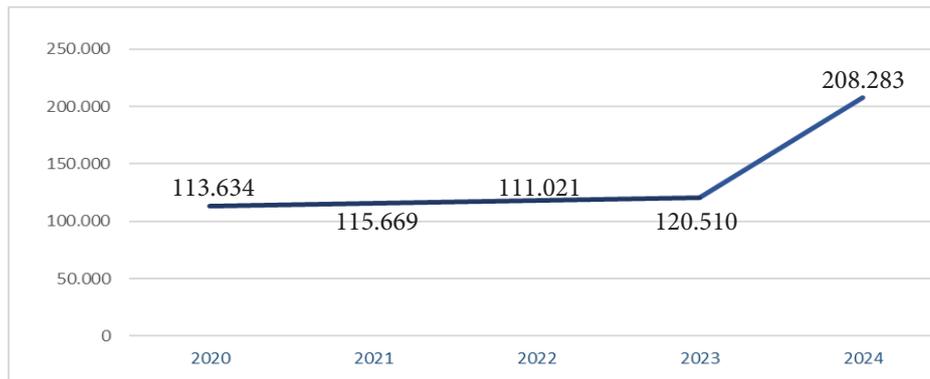
Penghitungan produk pengembangan bahasa yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu dilakukan berdasarkan perhitungan akumulasi jumlah produk. Pada tahun 2024, indikator jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra didukung oleh kegiatan yang menghasilkan produk kodifikasi bahasa. Realisasi IKK jumlah produk pengembangan bahasa 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 9 produk telah terealisasi sebanyak 10 produk dengan persentase capaian sebesar 111%. Berikut perincian dari produk yang terealisasi pada tahun 2024. Perincian dari produk yang terealisasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring



Gambar 4.1 Tampilan Baru KBBI VI Daring

Tahun 2024 menjadi salah satu tahun dengan catatan istimewa dalam sejarah perkembangan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada tahun ini, kosakata dalam KBBI mencapai 208.283 entri, dengan penambahan sebanyak lebih dari 80.000 entri baru. Hal ini merupakan pencapaian yang belum pernah dilakukan, karena pada tahun-tahun sebelumnya penambahan kosakata baru dalam KBBI per tahun secara konsisten hanya sebanyak 2.000 entri yang dimutakhirkan dua kali dalam setahun



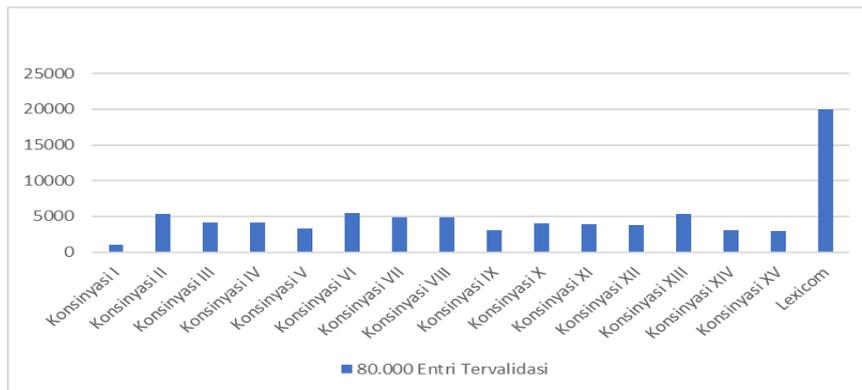
Grafik 4.1 Tren Pningkatan jumlah entri KBBI 2020--2024

Pemutakhiran KBBI 2024, menggerakkan statistik KBBI secara signifikan pada klasifikasi data kamus, pencarian, dan pengguna. Berikut perinciannya.

	Kata Turunan	34.465		16.535.736 Pengguna
	Gabungan Kata	65.804		
	Peribahasa	2.751		
	Idiom	479		
	Ungkapan	2.093		288.301.301 Pencarian
	Makna Total	229.283		
	Entri Total	208.293		

Untuk mengumpulkan 80.000 entri dalam waktu satu tahun, Tim Perkamusan dan Peristilahan menargetkan 60.000 kosakata baru melalui 15 kali konsinyasi inventarisasi kosakata dengan melibatkan berbagai pihak terpilih, antara lain anggota KKLK (Tim Redaksi) dari UPT, validator, redaktur,

dan editor eksternal hasil rekrutmen, juga mahasiswa jurusan bahasa dan sastra dari 18 perguruan tinggi. Sumber entri berasal dari usulan masyarakat, Kamus Bidang Ilmu, serta hasil inventarisasi kosakata bahasa daerah yang terverifikasi melalui Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD). Sementara itu, sebanyak 20.000 kosakata baru lainnya diperoleh dari hasil kerja sama antara Tim Perkamusan dan Peristilahan (Badan Bahasa) dengan Oxford University Press (OUP) dan Lexical Computing CZ (Lexicom) melalui proyek Lemony dan Dictionary Express. Berikut progress hasil program percepatan entri KBBI tahun 2024.



Grafik 4.2 Tren penambahan entri KBBI selama kegiatan Konsinyasi Inventarisasi Kosakata 1--15 dan dari Lexicom

Pelibatan Anggota KKLK (Tim Redaksi) di UPT

Pelibatan Anggota KKLK Perkamusan dan Peristilahan di Balai/Kantor Bahasa, dilakukan untuk mengimbangi beban kerja KBBI yang naik menjadi 2.000% di tahun 2024 ini. Peran redaksi juga disesuaikan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan efisien. Berikut perbedaan jumlah redaksi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.



Pelibatan Editor Eksternal (Editor Rekrutmen)

Selain usulan kosakata baru dari tim redaksi internal dan masyarakat umum, penambahan usulan baru juga dilakukan oleh 20 editor eksternal yang direkrut secara khusus untuk mengusulkan kosakata baru sebanyak 20.000 entri, dengan target masing-masing 1.000 entri. Editor eksternal terikat dalam perjanjian kerja pada bulan Maret—Oktober 2024.

Gambar 4.2 Rekrutmen Editor KBBI Daring 2024

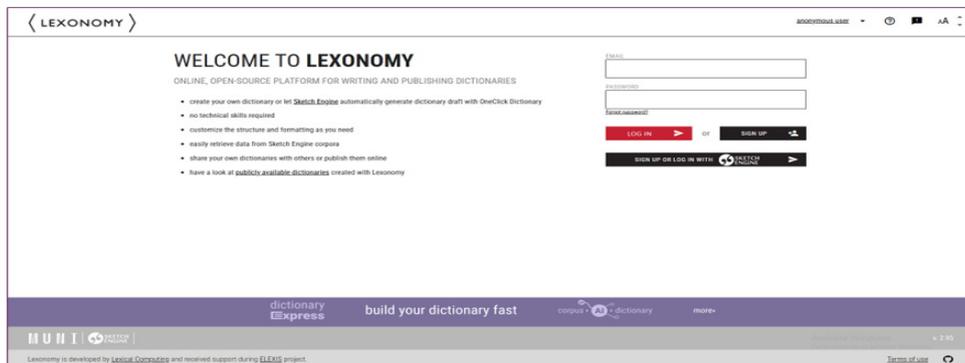
Pelibatan Editor Eksternal (Editor Rekrutmen)

Selain usulan kosakata baru dari tim redaksi internal dan masyarakat umum, penambahan usulan baru juga dilakukan oleh 20 editor eksternal yang direkrut secara khusus untuk mengusulkan kosakata baru sebanyak 20.000 entri, dengan target masing-masing 1.000 entri. Editor eksternal terikat dalam perjanjian kerja pada bulan Maret—Oktober 2024.

- Universitas Indonesia
- Universitas Sebelas Maret
- Universitas Al Azhar Indonesia
- Universitas Ahmad Dahlan
- Unika Atma Jaya
- Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Universitas Negeri Jakarta
- Universitas Negeri Malang
- Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
- UIN Sunan Ampel Surabaya
- UIN Syarif Hidayatullah
- Universitas Brawijaya
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Airlangga
- Universitas Negeri Yogyakarta
- Universitas Muhammadiyah Malang
- Universitas Sanata Dharma
- Universitas Negeri Surabaya

Kerja sama dengan Oxford University Press (OUP) dan Lexical Computing SZ (Lexicom)

Sebanyak 20.000 entri dari target 80.000 entri KBBI, dikerjakan secara semiotomatis melalui kerja sama trilateral antara Tim Perkamusan dan Peristilahan (Badan Bahasa) dengan OUP dan Lexicom. Dalam kerja sama ini, OUP dan Lexicom memberikan data calon kosakata baru dari data korpus bahasa Indonesia yang telah ditapis dari data KBBI. Lexicom juga memberikan akses penggunaan platform Lexonomy bagi Tim Perkamusan dan Peristilahan untuk menyeleksi dan menyunting calon kosakata baru, sebelum akhirnya siap dimasukkan secara otomatis ke dalam KBBI.



Gambar 4.3 Tampilan platform Lexonomy

Perolehan Usulan dari Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD)

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penambahan entri KBBI tahun ini juga masih diperoleh dari hasil inventarisasi kosakata yang dilaksanakan oleh Balai dan Kantor Bahasa melalui program Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD). Berikut hasil inventarisasi kosakata Balai/Kantor Bahasa tahun 2024.

Tabel 4.3 Matriks entri KBBI dan tiap Balai/Kantor

No.	Balai/Kantor	Target Entri	Usulan Awal	Terverifikasi
1	Balai Bahasa Provinsi Aceh	910	910	514
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara	707	707	428
3	Balai Bahasa Provinsi Riau	846	846	504
4	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat	506	509	431

5	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan	773	773	585
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	351	400	350
7	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	745	745	525
8	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	279	283	274
9	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	661	757	597
10	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	1.127	1.134	762
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	682	684	445
12	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	1.013	1.003	774
13	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	505	505	437
14	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	683	702	582
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	845	856	630
16	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	540	540	295
17	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	854	927	655
18	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	572	577	493
19	Balai Bahasa Provinsi Bali	615	615	508
20	Balai Bahasa Provinsi Papua	508	508	405
21	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	350	352	288
22	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	1.303	1.303	391
23	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	742	744	611
24	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	1.078	1.078	499
25	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	301	301	261
26	Kantor Bahasa Provinsi Banten	523	526	309
27	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	514	520	453
28	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	1.196	1.196	911
29	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	711	711	454
30	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	802	836	484
TOTAL		21.267	21.714	15.021

Untuk mendukung pemutakhiran data KBBI, Tim Perkamusan dan Peristilahan juga melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Aplikasi KBBI Daring. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengembangkan fitur-fitur KBBI Daring yang dibutuhkan untuk dapat mendukung upaya kerja tim redaksi dalam penambahan kosakata, membuat penyajian kosakata kepada publik yang lebih baik, serta mengatasi berbagai kudu yang menghambat proses kerja tim redaksi.

2) Senarai Istilah Sidang Komisi Istilah

Senarai Istilah Sidang Komisi Istilah merupakan keluaran dari kegiatan Sidang Komisi Istilah (SKI). Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setahun dua kali. Namun, tahun 2024, pelaksanaan Sidang Komisi Istilah hanya dilaksanakan sekali karena ada pengalihan fokus untuk mengejar target percepatan KBBI 200.000 entri. Dalam kegiatan Sidang Komisi Istilah dilakukan pepadanan istilah asing dan penyeragaman istilah yang sudah dipadankan sebelumnya. Sidang Komisi Istilah melibatkan pakar, baik akademisi maupun praktisi, dari berbagai bidang ilmu untuk mengumpulkan dan mendiskusikan istilah bidang ilmu yang telah ditentukan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.



Gambar 4.4 Kegiatan Sidang Komisi Istilah

Dalam setiap penyelenggaraan Sidang Komisi Istilah, lima hingga tujuh komisi bidang ilmu bersidang. Bidang ilmu yang disidangkan merupakan bidang ilmu yang populer atau yang masih banyak menggunakan istilah bahasa asingnya, baik dalam kegiatan akademis maupun profesional, karena belum dipadankan. Selain itu, terdapat pula bidang ilmu yang disidangkan atas permintaan khusus dari lembaga tertentu. Berikut capaian entri dalam senarai istilah sidang komisi istilah tahun 2024.

Tabel 4.4 Matriks entri tiap Seranai Istilah

No	Komisi	Jumlah Entri
1	Senarai Istilah Ilmu Geologi	383
2	Senarai Istilah Ilmu Astronomi	522
3	Senarai Istilah Ilmu Pangan Subbidang Industri Pangan	519
4	Senarai Istilah Ilmu Pertahanan Subbidang Industri Pertahanan	612
5	Senarai Istilah Ilmu Pendidikan Subbidang Kebijakan Pendidikan	290
6	Senarai Istilah Ilmu Komunikasi Subbidang Penyiaran	606
Total Entri		2.932

3) Kamus Bidang Ilmu (KBI)

Kamus Bidang Ilmu merupakan rujukan yang memuat sejumlah istilah bidang ilmu tertentu yang disusun secara alfabetis disertai dengan definisinya. Kamus Bidang Ilmu sangat diperlukan untuk memperluas wawasan para ilmuwan khususnya para dosen, mahasiswa, dan penerjemah, pada saat mereka memerlukan padanan dan makna suatu istilah. Kamus ini dapat memberikan informasi tentang istilah khusus suatu bidang ilmu, padanan, dan maknanya. Tahun 2024, Tim Perkamusan dan Peristilahan telah menyelesaikan empat buah kamus bidang ilmu, yakni Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Diplomasi Pertahanan, Kamus Bidang Ilmu Komunikasi Subbidang Hubungan Masyarakat, Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Kurikulum, dan Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Pengajaran dan Pembelajaran. Jumlah entri yang dicapai melalui empat kamus bidang ilmu tersebut sebanyak 3.726 kosakata. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu, yaitu 3.534 kosakata.

Penyusunan Kamus Bidang Ilmu adalah kelanjutan dari kegiatan Sidang Komisi Istilah yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pendefinisian, verifikasi, dan penyuntingan. Dalam pengumpulan data, penyusun mencari data dari berbagai terbitan, baik cetak maupun elektronik. Data yang dikumpulkan meliputi konteks, kelas kata, definisi (jika ada), sumber konteks,

dan sumber definisi. Data hasil seleksi didefinisikan sesuai dengan konteks pemakaiannya dengan merujuk ke berbagai sumber, baik sumber cetak, lisan, maupun sumber elektronik (internet). Pen-definisian didasarkan pada prinsip-prinsip leksikografi dan ejaan yang benar. Data yang sudah didefinisikan dan dianggap layak kemudian diverifikasi melalui Sidang Komisi Istilah (SKI) untuk melihat kesesuaian dengan ejaan dan memenuhi syarat dalam penguasaan bahasa dan prinsip-prinsip leksikografi. Pada tahap tersebut, dilakukan verifikasi entri tertentu kepada ahlinya sebelum ditetapkan sebagai entri dalam kamus. Setelah substansi dalam definisi diverifikasi, entri beserta penjelasannya kemudian disunting secara bahasa sesuai dengan kaidah EYD, serta sesuai dengan prinsip leksikografi.



Gambar 4.5 Cover Kamus Bidang Ilmu

4) Kamus Etimologi

Selain Kamus Bidang Ilmu, pengembangan kamus juga dilakukan dengan penyusunan kamus etimologi. Seperti kita ketahui, kosakata bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Cina, Belanda, Jawa Kuno, dan Persia. Penyerapan kosakata tersebut dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pemadanan, penerjemahan, serta penyesuaian ejaan dan lafal. Dalam KBBI, tidak semua kosakata yang terserap dari bahasa asing diberi label bahasa asal. Oleh karena itu, informasi etimologis perlu untuk terus ditambahkan pada kosakata yang diserap dari bahasa asing agar asal-usul kata tersebut dapat diketahui dengan jelas dan terdata dengan baik. Dengan demikian, penyusunan kamus etimologi ini sangat diperlukan untuk menunjang program pengembangan kamus.



Gambar 4.6 Cover KamusEtimologi

5) Sipebi

Untuk memberikan pelayanan terbaik dan menunjang kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan aplikasi kebahasaan, Tim Perkamusan dan Peristilahan terus mengembangkan aplikasi Sistem Penyuntingan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan Sipebi. Sipebi telah populer digunakan oleh masyarakat sejak diluncurkannya pada tahun 2021. Sipebi merupakan aplikasi penyuntingan bahasa yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi tersebut menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan dari ahli bahasa. Aplikasi ini bersifat luring mudah alih (portable) dan dapat diunduh melalui KBBI Daring. Hingga Desember 2024, aplikasi Sipebi sudah diunduh sebanyak 154.604 kali. Dengan demikian terdapat kenaikan jumlah pengunduh sebanyak 120.126 dari jumlah tahun lalu.



Gambar 4.7 Tampilan halaman depan SIPEBI

Lembar Kerja		Lembar Analisis	
dalam	— Dalam Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat [Paragraf 1, Elemen ke-1] [Sipebi KAK] [Sipebi] Kapital pada Awal Kalimat	Gunakan? Tidak	Pilihan ⓘ ✓ ✗ ✖
faham	— paham [faham] merupakan bentuk takbaku/penulisan yang salah dari [paham] [Paragraf 1, Elemen ke-3] [SMDC0] [Morfologi] Takbaku/Penulisan Yang Salah	Gunakan? Tidak	Pilihan ⓘ ✓ ✗ ✖
metafisik	— metafisika [metafisik] merupakan bentuk takbaku/penulisan yang salah dari [metafisika] [Paragraf 1, Elemen ke-4] [SMDC0] [Morfologi] Takbaku/Penulisan Yang Salah	Gunakan? Tidak	Pilihan ⓘ ✓ ✗ ✖
abadiah	— abadi <abad> → -iah = abadi - Penulisan sufiks [-lah] pada kata dasar yang berakhir dengan huruf [i,u] memiliki bentuk akhir sufiks [-lah] dan memiliki aturan perubahan huruf akhir sebagai berikut: <i> menjadi <u>, <u> menjadi <i> [Paragraf 1, Elemen ke-6] [SMDC1.72] [Morfologi] [SI] -lah + [i];[u]	Gunakan? Tidak	Pilihan ⓘ ✓ ✗ ✖

Gambar 4.8 Tampilan aplikasi SIPEBI

Fokus utama dalam pengembangan Sipebi tahun 2024 adalah penambahan data kamus Sipebi dan kamus kesalahan Sipebi. Saat ini, terdapat 186.562 ribu data pada kamus Sipebi, 52.700 ribu di antaranya adalah data formasi morfologi, dan 10.321 data kesalahan pada kamus kesalahan Sipebi. Jumlah data ini, meskipun sudah cukup memuaskan mengingat waktu pengumpulannya hanya dilakukan dalam satu tahun terakhir, masih perlu ditambah secara signifikan guna (1) meningkatkan kemampuan penyuntingan Sipebi dan (2) mempersiapkan lebih banyak sumber daya data (data resources) untuk dapat digunakan sebagai set data latihan (training dataset) bagi perangkat prosesi bahasa alami Sipebi (PBA Sipebi) yang direncanakan akan dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. PBA Sipebi ini diperlukan untuk memungkinkan Sipebi melakukan kasus-kasus penyuntingan yang lebih kompleks, seperti kasus-kasus yang memerlukan pengertian semantik dan identifikasi kelas kata dalam kalimat. Tanpa set data latihan yang memadai, algoritma pembelajaran mesin semata, meskipun sangat baik, tidak mungkin akan membuat suatu perangkat PBA memiliki kualitas kerja yang baik.

Produk Pengembangan Sastra

Capaian indikator kinerja kegiatan untuk jumlah produk pengembangan sastra pada tahun 2024 yang diampu oleh Tim Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sudah melebihi target sebesar 102,3 persen dengan jumlah produk sebanyak 175 produk dari target sebanyak 172 produk.

Ketercapaian 175 produk tersebut berupa (a) 114 judul komik cerita rakyat dari 38 provinsi dan (b) 61 judul cerita bergambar yang bersumber dari manuskrip Hikayat Raja Budak. Selain 175 produk tersebut, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga berhasil membuat produk pengembangan sastra lain, yaitu 1 pangkalan data Ensiklopedia Sastra Indonesia dan 3 antologi cerita pendek Penyusunan Sejarah Sastra Indonesia.

Penyusunan 175 produk pengembangan sastra merupakan hasil kolaborasi antara Tim Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Pusat dengan 38 Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta Asosiasi Komik Indonesia (AKSI). Dalam proyek ini, UPT berperan penting dengan mengusulkan cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Cerita-cerita ini dipilih berdasarkan kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, AKSI berperan merealisasikan cerita-cerita tersebut ke dalam bentuk komik dan cerita bergambar. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari UPT, sehingga hasil akhir tetap mengacu pada esensi cerita rakyat yang asli. Melalui pendampingan intensif dari UPT, komik dan cerita bergambar yang dihasilkan tetap mempertahankan jalan cerita aslinya tanpa mengubah alur atau pesan moral yang terkandung. Namun, agar lebih relevan dengan kondisi pembaca saat ini, beberapa elemen dalam cerita disesuaikan, seperti gaya visual, dialog, dan penyampaian cerita. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan sastra daerah kepada generasi muda dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya melestarikan cerita rakyat, tetapi juga menjembatani warisan budaya dengan dunia modern melalui medium komik dan cerita bergambar.

Penetapan komik dan cerita bergambar sebagai jenis produk yang disusun pada tahun 2024 didasarkan pada pertimbangan bahwa penanggung jawab untuk produk dalam bentuk film, termasuk animasi, secara substansi dan penjaminan mutu diampu oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pertimbangan lain dalam menetapkan komik dan cerita bergambar sebagai produk pengembangan sastra adalah untuk mendukung program prioritas Badan Bahasa, yaitu literasi kebahasaan dan kesastraan. Dengan demikian, produk pengembangan sastra yang disusun tidak hanya mendukung program prioritas pelindungan bahasa dan sastra daerah, tetapi juga mendukung literasi kebahasaan dan kesastraan. Produk tersebut diharapkan mampu mendukung upaya penyediaan bahan bacaan literasi yang bermutu dan dapat dijangkau ketersediaannya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, komik dan cerita bergambar yang bersumber dari khazanah sastra Nusantara ini diharapkan mampu mendorong praktik baik literasi baca-tulis di sekolah, di komunitas literasi, serta kegiatan lain yang berkaitan erat dengan penumbuhan budaya literasi, termasuk literasi sastra dan budaya.

a) Buku Komik

Berbeda dengan tahun 2022 dan 2023, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kini berfokus pada produksi komik yang bersumber dari cerita rakyat Nusantara. Langkah ini merupakan upaya pemodernan sastra melalui alih wahana, yaitu mengadaptasi karya sastra ke dalam media yang lebih relevan dengan kebutuhan pembaca masa kini. Komik cerita rakyat berseri ini disusun dengan menghadirkan cerita yang menarik, penuh pesan moral, dan tetap mempertahankan kekayaan budaya Nusantara. Total ada 114 judul cerita rakyat yang berhasil diangkat menjadi komik, mencakup kisah-kisah dari 38 provinsi di Indonesia.

Komik ini dirancang khusus untuk pembaca usia 10 hingga 13 tahun, atau sering disebut pembaca kategori C. Dengan gaya visual yang menarik dan narasi yang mudah dipahami, komik ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran budaya yang menyenangkan bagi generasi muda. Selain itu, penggunaan format komik dianggap lebih efektif dalam memperkenalkan nilai-nilai lokal

kepada anak-anak, sekaligus menghidupkan kembali cerita rakyat yang mungkin mulai dilupakan. Melalui inovasi ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menjembatani tradisi dengan modernitas dalam bentuk yang kreatif dan edukatif.



Gambar 4.8 Cover Buku Komik

b) Buku Cerita Bergambar

Selain komik, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga menyusun cerita bergambar alihwahana yang diadaptasi dan terinspirasi dari manuskrip berjudul Hikayat Raja Budak. Rangkaian buku cergam alihwahana ini diberi judul Hikayat Raja Putri. Sebuah kisah yang berasal berasal dari Melayu. Tokoh utama dalam cergam ini adalah anak-anak, Oleh karena itu, ia disebut Raja Budak, atau raja anak-anak. Dia memiliki 6 orang adik laki-laki.

Sampai saat ini diketahui terdapat 7 manuskrip Hikayat Raja Budak. Tiga manuskrip merupakan koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia, satu manuskrip disimpan di Saint Petersburg Rusia, dan tiga manuskrip di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Adapun cerita yang ditampilkan dalam Seri Hikayat Raja Putri adalah koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia dengan kode V.d.W. 153 yang disunting oleh Dra. Jumsari Jusuf. Suntingan Hikayat Raja Budak diterbitkan tahun 1982 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cerita bergambar ini disusun dalam upaya mengenalkan khazanah manuskrip kepada anak-anak.



Gambar 4.9 Cover Buku Cerita bergambar

Untuk memastikan kualitas produk, pada tahap awal pembuatan, Tim Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan desain produk pengembangan sastra sebagai berikut.

Tabel 4.5 Matriks Komik dan Ceita Bergambar

Jenis Produk	Target Pembaca	Sumber Cerita	Jumlah
Komik	Pembaca Semenjana (C) usia 10--13 tahun	Cerita rakyat dari 38 provinsi	114
Cerita Bergambar	Pembaca Awal (B) usia 7--10 tahun	Manuskrip melayu klasik	61

Target pembaca di atas didasarkan pada kebutuhan bahan bacaan literasi bermutu yang dapat mendorong minat anak-anak untuk menggali khazanah sastra dan budaya di daerah. Sementara penentuan sumber cerita diselaraskan dengan upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah yang menjadi tugas inti dari Tim Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Dalam pembuatan produk pengembangan sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali berkolaborasi dengan berbagai pihak yang dikenal dengan model pentahelix. Model pentahelix melibatkan kolaborasi lima unsur subjek atau stakeholder di bidangnya. Lima unsur yang dimaksud meliputi akademisi, pelaku industri/bisnis/praktisi, komunitas, pemerintah, dan media. Kerja sama lima unsur tersebut kerap juga disingkat ABCGM (academician, business, community, government, dan media). Pembagian peran antara kelima unsur tersebut yang terlibat dalam pembuatan produk pengembangan sastra pada 2024 ini dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Unsur Pentahelix

Unsur	Instansi	Peran
akademisi	peneliti, sastrawan, budayawan, dosen	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sumber cerita tertulis maupun lisan serta bahan rujukan untuk visualisasi cerita Menjadi narasumber dalam konsultasi penyusunan desain produk sampai dengan produk jadi
praktisi/pelaku industri	penulis naskah, ilustrator, studio animasi, dan praktisi animasi (komik lainnya)	Melakukan produksi komik dan cerita bergambar mulai dari penulisan naskah sampai dengan pengatakan artwork final
komunitas	Asosiasi Komik Indonesia (AKSI), Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa)	Berperan sebagai tim ahli maupun narasumber
pemerintah	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Balai/kantor bahasa, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Kementerian/Badan Ekonomi Kreatif, Pusat Perbukuan	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa berperan sebagai verifikasi pusat, tim penyunting, dan tim penulis cerita bergambar Balai/kantor bahasa berperan sebagai pengusul cerita dan verifikasi daerah untuk komik cerita rakyat dari 38 provinsi Disparekraf DKI Jakarta dan Kementerian/Barekraf sebagai mitra dalam diseminasi produk di Indonesia Comic Con 2024 Pusat Perbukuan berperan sebagai penilai kelayakan komik dan cerita bergambar
media	Media massa dan penyedia layanan buku digital maupun webtoon	<ul style="list-style-type: none"> Media massa (pers, jurnalistik) berperan untuk mempublikasikan kegiatan terkait pembuatan produk pengembangan sastra dan produknya Penyedia layanan buku digital dan webtoon berperan sebagai platform penyedia komik dan cerita bergambar untuk diakses oleh masyarakat luas

Analisis manfaat dari produk yang telah dihasilkan

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah berhasil mengerjakan produk-produk kebahasaan yang ditargetkan pada tahun 2024, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Senarai Istilah Sidang Komisi Istilah, Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Diplomasi Pertahanan, Kamus Bidang Ilmu Komunikasi Subbidang Hubungan Masyarakat, Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Kurikulum, Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Pengajaran dan Pembelajaran, Kamus Etimologi Bahasa Belanda, Kamus Etimologi Bahasa Inggris, Kamus Etimologi Bahasa Jepang, serta Aplikasi Sipebi. Melalui produk-produk kebahasaan ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berkomitmen untuk memberikan manfaat dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pengguna pada berbagai konteks dan keperluan praktis. Produk-produk



Gambar 4.10 Pengguna KBBI dari luar negeri

ini juga berperan untuk menyebarkan pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang bahasa Indonesia pada khususnya. Pada produk kamus, eksistensi manfaat KBBI dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pengguna KBBI dari tahun ke tahun sebagai berikut.

Produk-produk kebahasaan yang telah dikerjakan Tim Perkamusan dan Peristilahan juga memberi manfaat pada bidang penelitian. Produk KBBI dan Sipebi telah diulas dan digunakan pada berbagai penelitian, yang tercatat pada Google Cendekia

berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan sastra (baik dalam bentuk tulisan, pertunjukan, atau bentuk seni lainnya) dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Analisis dampak dari produk pengembangan sastra dijabarkan dalam beberapa butir berikut ini.

- **Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Budaya.** Produk pengembangan sastra berupa komik dan cerita bergambar dapat menjadi wadah untuk melestarikan cerita rakyat yang mungkin terlupakan atau jarang didongengkan lagi. Dengan format yang menarik dan mudah dipahami, komik dan cerita bergambar dapat menarik minat generasi muda untuk mengenal dan menghargai budaya leluhur.
- **Peningkatan Minat Baca.** Format visual yang menarik dan cerita yang ringan membuat komik dan cerita bergambar menjadi media bacaan yang menyenangkan, terutama bagi anak-anak. Dengan sering membaca komik dan cerita bergambar, minat baca secara umum dapat meningkat.
- **Pengembangan Kreativitas.** Komik dan cerita bergambar dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan kreativitas dalam menulis, menggambar, atau membuat karya seni lainnya, bahkan dapat melahirkan pengembangan di bidang industri lain, seperti film animasi, gim, dan merchandising.
- **Media Pembelajaran yang Efektif.** Komik dan cerita bergambar dapat menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga efektif sebagai media pembelajaran. Visualisasi dalam komik dan cerita bergambar dapat membantu meningkatkan daya ingat terhadap informasi yang disampaikan.

Analisis Pendukung Ketercapaian Target Indikator Kinerja

Pada tahun 2024, berbagai kegiatan, baik mandiri maupun kolaborasi, telah dilaksanakan oleh Tim Perkamusan dan Peristilahan untuk mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja. Pada realisasi target penambahan data KBBI sebanyak 200.000 entri, Tim Perkamusan dan Peristilahan melaksanakan Konsinyasi Inventarisasi Kosakata sebanyak 15 kali dengan dukungan berbagai pihak terkait, antara lain anggota KKLP (Tim Redaksi) dari UPT, validator, redaktur, dan editor eksternal hasil rekrutmen, mahasiswa jurusan bahasa dan sastra dari 18 perguruan tinggi, serta dengan Oxford University Press (OUP) dan Lexical Computing CZ (Lexicom) melalui proyek Lexonomy dan Dictionary Express. Di samping itu, dukungan data pada program penambahan entri juga diperoleh dari kegiatan Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD).

Selain penambahan entri, terdapat kontribusi dari Kamus Etimologi berupa tambahan informasi pada entri KBBI, khususnya entri yang diserap dari bahasa asing, seperti bahasa Arab, Cina, dan Sanskerta, agar asal-usul kata tersebut dapat diketahui dengan jelas dan terdata. Kamus bidang Ilmu juga menjadi komponen penting KBBI yang memberikan informasi tentang istilah khusus suatu bidang ilmu, padanan, dan definisinya. Kamus Bidang Ilmu dan Kamus Etimologi turut memperkaya KBBI dengan menambahkan istilah-istilah khusus dan pelacakan asal-usul kata, sehingga KBBI menjadi rujukan bahasa yang komprehensif dan relevan.



Gambar 4.11 Kegiatan Konsinyasi Inventarisasi Kosakata

Dalam perjalanan penyusunan produk pengembangan tersebut, tidak terlepas dari hambatan. Hambatan yang dibarengi dengan strategi penyelesaian dalam pembuatan produk pengembangan bahasa dan sastra dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Hambatan, Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Inventarisasi Kosakata: Target 200 ribu entri KBBI terlalu besar dengan waktu yang sedikit dan SDM yang terbatas.	Merekrut editor eksternal, melaksanakan pembekalan mahasiswa sebagai calon pengusul entri KBBI, meningkatkan dan memonitor pelibatan tim redaksi KBBI dari UPT di seluruh Indonesia, dan melaksanakan 15 Konsinyasi Inventarisasi Kosakata.	Memperhitungkan target serasional mungkin.
Pemutakhiran KBBI: Lambatnya akses laman KBBI Daring karena server cadangan KBBI Daring belum memiliki lisensi.	Realisasi pembelian dan pemasangan server cadangan KBBI untuk membantu server utama dalam membagi lalu lintas data sehingga KBBI Daring berjalan lebih lancar dan stabil.	mendorong percepatan proses konfigurasi server sehingga dapat segera digunakan
Kamus Etimologi Progres penyusunan Kamus Etimologi Tamil tidak dapat dilaporkan karena terjadi kesulitan mencari pakar bahasa Tamil yang dapat diajak bekerja sama	Menunda penyusunan Kamus Etimologi Tamil pada tahun berikutnya	Mencari ahli bahasa Tamil yang bersedia berkomitmen penuh.
Integrasi Produk Kosakata dengan TIK Proses perizinan pembelian perangkat lunak memiliki prosedur yang sangat panjang.	Berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses pembelian perangkat lunak berjalan lancar.	Perlu penyederhanaan proses dan alur agar pengajuan dapat segera terealisasi demi percepatan pencapaian target penambahan entri.

<p>Pemutakhiran Sipebi: Pengerjaan penambahan data secara masif bagi Sipebi terundur ke akhir tahun karena proyek pengayaan KBBI yang berat dan lebih penting.</p>	<p>Memperbanyak jumlah penyunting data Sipebi yang diundang pada saat konsinyasi, serta memperbanyak jumlah konsinyasi dari tiga menjadi empat.</p>	<p>Mempersiapkan ruang antisipasi dari sisi waktu, biaya, dan tenaga kerja yang diperlukan.</p>
<p>Komik Pergantian studio mengakibatkan penyelesaian komik terhambat.</p>	<p>Membuat BAHP setiap termin pengerjaan dan melaporkan kemajuan pekerjaan studio.</p>	<p>Komunikasi efektif antartim, Rapat Koordinasi Rutin, evaluasi berkala, sistem dokumentasi aplikasi Whatsapp dan berita acara hasil pemeriksaan (BAHP) yang ditandatangani verifikatur pusat dan daerah untuk ditindaklanjuti oleh pihak studio</p>
<p>Cerita Bergambar Para penulis belum memiliki pengalaman membuat naskah cerita bergambar</p>	<p>Kolaborasi dengan Ilustrator, Pembuatan Template Naskah, dan pembimbingan Berkelanjutan dari pakar pembuat naskah cerita bergambar berbasis manuskrip</p>	<p>Diadakan pelatihan dan workshop menulis naskah cerita bergambar.</p>

2. Sasaran Kegiatan II Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Tim Pelindungan dan Pemodernan telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pelindungan bahasa dan sastra sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi bahasa dan sastra agar tetap dipergunakan oleh masyarakat pemilikinya. Untuk mendukung ketercapaian sasaran berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki peran untuk menyusun model pelindungan bahasa dan sastra. Model ini akan dijadikan acuan oleh balai dan kantor bahasa sebagai pelaksana pelindungan bahasa dan sastra daerah. Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki target sasaran sebanyak 8 model pelindungan yang terbagi menjadi 4 model pelindungan bahasa dan 4 model pelindungan sastra.

Partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap identitas budaya yang dimiliki. Masyarakat mulai mengenali pentingnya bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari identitas lokal dan keberlanjutan warisan budaya melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah. Meningkatnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari penyelenggaraan kegiatan kreatif dan budaya yang menampilkan bahasa dan sastra, seperti festival tunas bahasa ibu. Sebagai salah satu tahapan dari Revitalisasi Bahasa Daerah, festival tunas bahasa ibu menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif serta merangsang minat, bakat, dan kreativitas masyarakat dalam penggunaan bahasa daerah.

Dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah, masyarakat menunjukkan minat dan cinta terhadap kekayaan bahasa dan sastra daerah. Hal ini dapat

mendorong generasi muda untuk menghargai dan mewarisi bahasa dan sastra daerah ke generasi berikutnya. Peningkatan partisipasi masyarakat juga berjalan seiring dengan kerja sama antara komunitas lokal, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pendukung kebudayaan. Kolaborasi ini memperkuat upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah secara holistik. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah adalah langkah penting menuju pelestarian kekayaan budaya dan identitas lokal. Ini juga menciptakan momentum untuk mengembangkan inisiatif bersama yang dapat mewujudkan keberlanjutan bahasa dan sastra daerah.

2.1. Indikator Kinerja Kegiatan II.I Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 5.1 Target dan Realisasi IKK
Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	2023	Tahun 2024			Renstra		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1 Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra	6	7	8	10	125%	8	10	125%

Konsep yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai acuan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah. Model pelindungan bahasa dan sastra disusun sebagai standar pelaksanaan pelindungan di daerah agar sesuai dengan pedoman dan acuan yang telah disusun. Model pelindungan bahasa dan sastra dapat dilakukan melalui pendidikan, penggalan potensi-potensi bahasa dan sastra, pendataan, pendaftaran, pendokumentasian, pengaksaraan, publikasi, dan revitalisasi penggunaan bahasa dan sastra. Model pelindungan bahasa dan sastra tersebut diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Metode penghitungan indikator kinerja jumlah model pelindungan bahasa dan sastra adalah dengan menjumlahkan model-model pelindungan bahasa dan sastra yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu. Pada tahun 2024 indikator jumlah model pelindungan bahasa dan sastra didukung oleh kegiatan dari RO (Rincian Output) model pelindungan bahasa dan model pelindungan sastra.

$$MBS = \sum M$$

Keterangan:

PPBS = Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

M = Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Realisasi IKK jumlah model pelindungan bahasa dan sastra 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 8 model telah terealisasi sebanyak 10 model dengan persentase capaian sebesar 125% Model-model yang telah tersusun yaitu:

1. Pedoman Konservasi Manuskrip Nusantara

2. Pedoman Konservasi Bahasa
3. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah
4. Rencana Induk Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara
5. Risalah Kebijakan
6. Petunjuk Teknis Registrasi Sastra Daerah
7. Pedoman Digitalisasi Pemetaan Sastra
8. Petunjuk Teknis Festival Teater Bahasa Daerah
9. Petunjuk Teknis Kemah Cerpen Bahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu
10. Petunjuk Teknis Festival Film Pendek Berbahasa Daerah

Dalam merealisasikan target indikator kinerja, jumlah model perlindungan bahasa dan sastra Tim Pelindungan dan Pemodelan melakukan tugas dan fungsinya dengan dipayungi oleh rincian output model perlindungan bahasa dan model perlindungan sastra.

1. Pedoman Konservasi Manuskrip Nusantara

Sebagai salah satu kegiatan yang mendukung upaya perlindungan sastra, konservasi dilakukan sebagai kelanjutan dari pemetaan dan kajian vitalitas. Konservasi sastra dilakukan baik untuk objek sastra lisan, manuskrip, maupun sastra cetak. Konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian. (KBBI, 1996: 520). Konservasi manuskrip dilakukan untuk menyelamatkan naskah yang kondisinya terancam punah akibat termakan usia. Kegiatan konservasi manuskrip adalah pendokumentasian segala macam dokumen karya sastra dalam bentuk tulisan tangan dengan media kertas, daun lontar, kulit kayu, bambu, atau tulang dan tanduk binatang. Manuskrip yang dikonservasi ditujukan pada naskah yang berisi cerita rakyat (legenda, mite, dsb.), puisi rakyat, dan drama tradisional dengan beragam genrenya, serta naskah-naskah yang berisi perihal obat-obatan, hukum, aturan keagamaan, atau yang berisi silsilah keluarga kerajaan, kelompok etnis, dan puak tertentu.

Tujuan pemutakhiran petunjuk teknis konservasi manuskrip adalah untuk membuat aturan dan tata kerja pelaksanaan kerja bagi pusat dan daerah sehingga hasilnya sesuai dengan program perlindungan sastra mengenai isi dari manuskrip yang telah ditentukan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pelaksanaan pemutakhiran petunjuk teknis konservasi manuskrip ini adalah menghasilkan langkah kerja dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sastra dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian atau penelitian bagi para peneliti dan akademis maupun masyarakat umum.

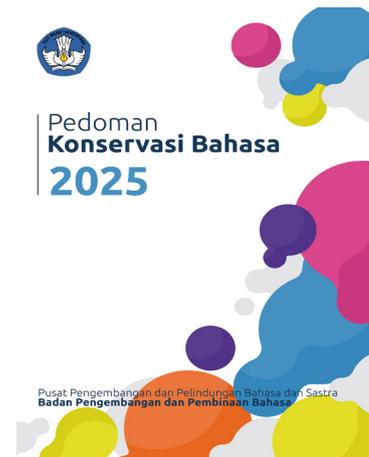
2. Pedoman Konservasi Bahasa

Berbagai langkah bisa diambil dalam upaya perlindungan bahasa daerah, seperti mendokumentasikan bahasa melalui kamus, penyusunan sistem tata bahasa, bahan ajar, memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan, hingga memanfaatkan teknologi modern seperti aplikasi atau media sosial untuk mempromosikan penggunaannya. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk konservasi bahasa yang didalamnya melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi nonpemerintah, komunitas lokal, lembaga Pendidikan, peneliti, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan perlindungan bahasa yang keberlanjutan. Dengan dukungan yang kuat dan kesadaran dari



Gambar 5.1 Cover Juknis Konservasi Manuskrip

berbagai pihak, bahasa-bahasa daerah di Indonesia dapat terlindungi dari kepunahan dan tetap menjadi bagian integral dari kekayaan budaya bangsa. Pedoman ini merupakan panduan umum pelaksanaan konservasi bahasa dalam penyediaan sumber informasi yang terstruktur dan mudah diakses mengenai upaya pelestarian bahasa daerah. Pedoman ini ditujukan bagi Pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk konservasi bahasa daerah, para pendidik dan akademisi dalam mengembangkan program pendidikan dan penelitian yang mendukung pelestarian bahasa daerah, serta bagi komunitas dan pegiat bahasa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menghidupkan kembali dan mempertahankan penggunaan bahasa daerah. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam upaya menjalankan program konservasi bahasa.



Gambar 5.2 Cover Pedoman Konservasi Bahasa

3. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah

Seiring revolusi industri dan percepatan globalisasi, keberadaan bahasa dan sastra daerah, mencakup masyarakat, sejarah, dan budaya yang terkait dengannya, terancam punah. Data menunjukkan kepunahan bahasa dan sastra daerah terus terjadi dari waktu ke waktu karena berbagai faktor. Oleh karena itu, upaya pelestarian bahasa dan sastra menjadi hal yang sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam rangka mendorong dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2024 menginisiasi penyaluran Bantuan Pemerintah untuk pelestari bahasa dan sastra daerah. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap para pelestari bahasa dan sastra daerah berupa bantuan fasilitasi bagi komunitas dan penghargaan (apresiasi) bagi individu yang telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat, melindungi, dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah di Indonesia.



Gambar 5.3 Cover Juknis Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah

Program Bantuan Pemerintah untuk pelestari bahasa dan sastra daerah akan dilaksanakan pada tahun 2025. Karenanya, diperlukan sebuah petunjuk teknis sebagai pedoman bagi (1) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam menentukan, menetapkan, dan menyalurkan Bantuan Pemerintah, (2) pelestari bahasa dan sastra daerah dalam mengajukan proposal bantuan maupun melaksanakan kegiatan bantuan fasilitasi, dan (3) aparat pengawas yang berwenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, petunjuk teknis disusun agar bantuan pemerintah yang disalurkan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat luas mengenai prosedur pengajuan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah. Petunjuk teknis ini dapat memberikan pedoman kepada penyelenggara bantuan dan pemeriksa program dalam melaksanakan dan mengevaluasi program bantuan.

4. Model Rencana Induk Peta Kebinekaan: Bahasa, Sastra, dan Aksara

Pelaksanaan pemetaan bahasa yang sudah berlangsung sejak tiga puluh tahun silam memungkinkan telah mengalami pergeseran. Sejumlah data bahasa dan persebarannya tidak sesuai lagi (tidak relevan) dengan kondisi di masyarakat serta pemekaran wilayahnya saat ini. Untuk merespons konkret upaya perlindungan bahasa dan sastra serta aksara tersebut, diinisiasi program pemetaan yang mengakomodasi bahasa, sastra serta aksara sastra pada 2025–2029 dalam jenama Peta Kebinekaan. Arah tujuan pemetaan bahasa, sastra, dan aksara (Peta Kebinekaan) di antaranya (a) pemetaan bahasa yang berkelanjutan sampai tuntas karena bahasa-bahasa yang diinventarisasi dan dideskripsikan hasil pemetaan sebelumnya masih belum diteliti, terutama pada bahasa-bahasa di wilayah timur Indonesia; (b) pemutakhiran peta bahasa yang telah dijadikan sebagai rujukan mengenai distribusi variasi bahasa; (c) pemetaan sastra dilakukan untuk menunjukkan keanekaragaman sastra yang ada di Indonesia, baik ragam maupun jenisnya; distribusi variasi sastra berdasarkan wilayah sebaran bahasa daerah; serta lokasi dan persebaran sastra di wilayah Indonesia yang belum digali dan dipetakan; (d) pemetaan aksara untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan ragam aksara di nusantara serta melestarikan warisan budaya Nusantara yang tak ternilai.



Gambar 5.4 Cover Rencana Induk Peta Kebinekaan

Rencana Induk Peta Kebinekaan: Bahasa, Sastra, dan Aksara 2025–2029 disusun sebagai rujukan baru yang menggambarkan kebutuhan di seluruh provinsi di Indonesia tersebut, rencana induk itu tidak terlepas dari pedoman dan petunjuk teknis, baik bahasa dan sastra yang telah disusun dan dipedomani sebelumnya. Selain itu, perlu memastikan potensi wilayah bahasa yang belum terpetakan serta sebaran baru isolek yang potensial menambah jumlah dan bahasa baru.

5. Risalah Kebijakan

Tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah meluncurkan Risalah Kebijakan Edisi I bertepatan dengan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional pada tanggal 21 Februari 2024. Topik risalah ini ialah Revitalisasi Bahasa Daerah dengan mengangkat judul “Arah Baru Revitalisasi Bahasa daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia”. Risalah ini memuat secara singkat kebijakan RBD di Indonesia yang mengalami beberapa fase dengan pendekatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap bahasa. Mulai tahun 2021 Kemendikbudristek menerapkan arah baru dalam implementasi RBD di Indonesia yang mencakup kemitraan, pengembangan kurikulum, bimtek guru utama, pelibatan berbagai pihak dan raha penggunaan, serta prestise bahasa daerah dalam media dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Arah itu diterapkan secara berkesinambungan, berfokus, dan berdampak luas. Risalah ini menjadi panduan penting bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan berbasis kebutuhan dan kondisi masing-masing bahasa daerah. Selain itu, Keberlanjutan arah baru yang ditawarkan risalah ini juga membuka peluang inovasi dalam perlindungan bahasa daerah, termasuk integrasi teknologi dan dokumentasi modern. Dengan kebijakan yang berfokus dan berorientasi pada hasil, risalah ini memberikan landasan kokoh bagi langkah-langkah strategis selanjutnya untuk menjamin keberlangsungan warisan



Gambar 5.5 Cover Risalah Kebijakan

linguistik Indonesia. Lebih dari itu, risalah ini menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan daya tarik bahasa daerah di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan berbasis komunitas, penyebaran di media massa, dan pelibatan berbagai pihak, risalah ini menciptakan ekosistem yang mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai warisan budaya bangsa.

6. Registrasi Sastra Daerah

Registrasi Bahasa dan Sastra merupakan aplikasi pendataan objek kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan sebagai upaya pelindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Melalui aplikasi Registrasi Bahasa dan Sastra, pencatatan, penyimpanan, dan pendaftaran data kebahasaan dan kesastraan dapat dilakukan untuk mendukung pendokumentasian bahasa dan sastra sebagai kekayaan Indonesia yang harus dilindungi dalam satu data terpadu. Sebagai aplikasi pencatatan dan penyimpanan data, Registrasi Bahasa dan Sastra (Regbastra) memiliki lima data utama, yaitu data 1) bahasa daerah, 2) sastra lisan, 3) sastra cetak, 4) manuskrip/sastra tulisan tangan, dan 5) komunitas sastra. Konten yang terkait dengan bahasa daerah telah dikembangkan pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan pemutakhiran dan pengembangan aplikasi melalui penyediaan fitur penginputan data untuk objek kesastraan, yaitu fitur 1) sastra lisan, 2) sastra cetak, 3) sastra tulisan tangan, dan 4) komunitas sastra. Penyediaan fitur pendataan objek kesastraan atau registrasi sastra daerah pada tahun 2024 ini disesuaikan dengan cakupan data pada Kepmendikbudristek Nomor 36/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan.



Gambar 5.6 Cover Juknis Regbastra

7. Model Digitalisasi Pemetaan Sastra

Digitalisasi Pemetaan Sastra merupakan satu model pelindungan sastra yang terintegrasi dalam Pemetaan Sastra Daerah sebagai upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Pemetaan Sastra Daerah merupakan pijakan awal dalam berbagai kegiatan perlindungan sastra, seperti kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi sastra lisan, serta konservasi manuskrip dan sastra cetak. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan penelitian pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia sejak tahun 1992. Jauh sebelum itu telah pula dilakukan inventarisasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Dalam rangka melengkapi pemetaan khazanah kekayaan bangsa kita, pemetaan sastra perlu dilaksanakan. Meskipun pada tahun 2004—2014 telah dilakukan pemetaan sastra oleh Balai dan Kantor Bahasa di Indonesia, penelitiannya masih bersifat sporadis dan parsial: antara peneliti satu dengan peneliti yang lain di Balai/Kantor Bahasa masih menggunakan metode dan konsep yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghasilkan peta sastra di Indonesia dan deskripsinya yang selaras dan komprehensif belum dapat diwujudkan.



Gambar 5.7 Cover Model Digitalisasi Pemetaan Sastra

Hasil pemetaan, baik bahasa maupun sastra, adalah sarana untuk memahami ekspresi nilai, norma, aturan, adat kebiasaan, dan kearifan lokal yang memelihara budaya dan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Perlu disadari juga bahwa pemetaan sastra merupakan perjalanan panjang

untuk mengolah semua data dari tiap titik pengamatan. Pemetaan sastra berhubungan langsung dengan variasi sastra dan bersentuhan dengan permasalahan perlindungan dan ekologi sastra. Dasar dari semua permasalahan itu adalah pengkajian dan pengelolaan kekayaan bahasa dan sastra. Kegiatan pemetaan sastra juga merupakan salah satu upaya pendokumentasian serta langkah awal sebelum melakukan kajian vitalitas, konservasi, dan registrasi sastra dalam rangka perlindungan yang komprehensif.

Kriteria objek pemetaan sastra adalah (1) sastra yang menggunakan bahasa daerah, (2) berjenis sastra lisan, manuskrip, dan sastra cetak, dan (3) manuskrip dan sastra cetak yang ditulis dalam aksara latin dan aksara daerah

8. Petunjuk Teknis Festival Teater Bahasa Daerah

Petunjuk Teknis Festival Teater Bahasa Daerah adalah salah satu panduan bagi staf Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) balai atau kantor bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi revitalisasi bahasa daerah. Buku petunjuk teknis (juknis) ini memberikan penjelasan prosedural yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra (2019). Dengan adanya juknis ini, diharapkan staf Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta UPT (Balai/Kantor Bahasa) dapat melaksanakan tahapan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Program ini menysasar para penutur muda bahasa daerah sebagai tunas bahasa ibu yang diharapkan mampu menjaga dan melestarikan bahasa daerah secara berkesinambungan, mulai dari masa kini hingga masa yang akan datang. Penutur yang disasar dalam program ini adalah siswa jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Pelibatan generasi muda tingkat SMA/sederajat ini dipandang perlu mengingat bahwa salah satu upaya meminimalkan kepunahan bahasa adalah pewarisan. Dalam konteks pewarisan ini, generasi muda memiliki peran strategis sebagai penghubung antargenerasi dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah.

9. Petunjuk Teknis Juknis Kemah Cerpen Berbahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu

Petunjuk Teknis Kemah Penulisan Cerita Pendek (Cerpen) Berbahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu ini adalah buku panduan yang digunakan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk pelaksanaan Kemah Penulisan Cerpen Berbahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu 2023, yang selanjutnya disebut Kemah Cerpen. Petunjuk teknis (juknis) ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merancang desain kegiatan dan materi yang akan diberikan kepada peserta Kemah Cerpen dan luaran (output) yang akan dicapai.

Petunjuk Teknis Kemah Penulisan Cerita Pendek (Cerpen) Berbahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu ini adalah buku panduan yang digunakan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk pelaksanaan Kemah Penulisan Cerpen Berbahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu 2023, yang selanjutnya disebut Kemah Cerpen. Petunjuk teknis (juknis) ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merancang desain kegiatan dan materi yang akan diberikan kepada peserta Kemah Cerpen dan luaran (output) yang akan dicapai.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui program Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah mengidentifikasi tunas-tunas muda bahasa ibu sebagai aset bangsa yang memiliki potensi besar. Bakat dan kemampuan mereka perlu mendapatkan perhatian khusus

melalui pembinaan dan pengembangan berkelanjutan. Setelah mereka mendapatkan materi pembelajaran bahasa daerah, diperlukan tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan proses revitalisasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyediakan wadah pelatihan menulis cerpen berbahasa daerah.

Untuk itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan kegiatan bernama “Kemah Cerita Pendek Berbahasa Daerah Tunas Bahasa Ibu.” Kegiatan ini dirancang untuk melatih dan mendampingi tunas-tunas muda dalam mengembangkan bakat menulis cerpen. Selain sebagai sarana pelatihan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang kreasi dan ekspresi bagi mereka untuk berkarya dalam bahasa daerah. Program ini selaras dengan tujuan Merdeka Belajar, yakni memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat dan minat.

10. Petunjuk Teknis Festival Film Pendek Berbahasa Daerah 2024

Bahan koleksi Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra (Lab Bineka) dibuat dengan mengikuti pesatnya kemajuan digitalisasi dan informasi, salah satunya dengan pembuatan film pendek berbahasa daerah. Hal ini karena film yang menampilkan visual dengan ilustrasi suara banyak diminati oleh masyarakat, apalagi komponen visual merupakan salah satu karakteristik kognitif dalam belajar yang berpengaruh pada olah pikir dan rasa. Pembuatan bahan koleksi Lab Bineka dalam bentuk film bahasa daerah bertujuan untuk memperkaya bahan koleksi, meningkatkan wawasan kebinekaan bahasa, dan membangkitkan semangat kebinekaan bahasa.

Untuk memperkaya pendokumentasian data bahasa daerah dalam bentuk film, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan Festival Film Pendek Berbahasa Daerah 2024.

Pendokumentasian bahasa daerah ini dilakukan dengan melibatkan pelajar atau masyarakat umum sebagai tujuan untuk menambah koleksi video kebahasaan Lab Bineka, memberikan kesempatan bagi pengguna teknologi untuk mengekspresikan kreativitas, dan meningkatkan kecintaan terhadap bangsa di tengah perbedaan bahasa. Petunjuk Teknis Festival Film Pendek Berbahasa Daerah 2024 dibuat sebagai acuan yang jelas untuk para peserta festival film



Gambar 5.7 Cover Juknis FFPBD

Analisis manfaat dari produk yang telah dihasilkan

Dalam menyusun sebuah rekomendasi untuk penyusunan model pelindungan bahasa dan sastra, diperlukan perhatian pada sejumlah aspek mengenai luaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact), serta ukuran kinerja bagi setiap aspek tersebut. Dalam hal hasil (outcome) dapat dilihat pada capaian jangka menengah seperti berikut ini.

- Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan dari komunitas bahasa itu sendiri dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan sektor swasta dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
- Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan media dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;

- Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah, serta
- Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan sektor pendidikan dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah.

Analisis Pendukung Ketercapaian Target Indikator Kinerja

Analisis dampak dari model perlindungan bahasa dan sastra melalui penyusunan pedoman/juknis adalah ketersediaan rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan acuan. Pedoman dan juknis yang disusun berfokus pada kebijakan atau upaya untuk melindungi dan mengembangkan bahasa serta sastra suatu bangsa. Perlindungan berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan bahasa dan sastra daerah agar tetap eksis dalam menghadapi globalisasi dan pengaruh budaya asing. Penyusunan pedoman/juknis untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah memiliki berbagai dampak yang signifikan di berbagai aspek, baik itu sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Pedoman/juknis ini bertujuan untuk menjadi rujukan/acuan/pedoman dalam upaya melestarikan dan memajukan bahasa dan sastra daerah agar tidak punah atau tergerus oleh pengaruh bahasa dominan, seperti bahasa nasional atau bahasa asing.

Salah satu produk yang dihasilkan adalah Petunjuk Teknis Registrasi Sastra Daerah. Petunjuk teknis ini juga disusun sebagai penjelasan dalam melakukan pendataan /penginputan data objek kesastraan dalam aplikasi Registrasi Bahasa dan Sastra (Regbastra). Registrasi sastra daerah memberikan sejumlah dampak positif, baik untuk pelestarian budaya maupun pengembangan masyarakat. Berikut adalah dampak dari pengembangan aplikasi registrasi bahasa dan sastra daerah yang difokuskan pada penyediaan fitur registrasi sastra daerah.

Adapun hambatan dan strategi penyelesaian dalam penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2 Hambatan,Strategi Pencapaian, dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Penyelesaian	Langkah Antisipasi
Kapasitas penyimpanan server mencapai batas maksimal sehingga aplikasi tidak dapat diakses untuk dilakukan pengembangan fitur.	Berkoordinasi dengan koordinator SPBE Kementerian dan Sekretariat Badan untuk menambah kapasitas server atau memindahkan alamat domain ke PDNS.	Pelibatan intens tim teknologi informasi atau penyedia sarana dan prasarana SPBE dalam pengembangan aplikasi.
Peretasan yang sering terjadi karena fitur akses terbuka (open access).	Menghindari keterbukaan akses tanpa proses log in.	Fitur open access hanya diberikan kepada pengguna aplikasi terdaftar
Tidak ada SDM, baik yang mampu pengelolaan aplikasi, baik di bidang data kebahasaan dan kesastraan maupun dalam bidang sistem teknologi informasi	Mengusulkan SDM yang kompeten dalam bidang pengelolaan atau analisis data dan informasi dan sistem teknologi informasi.	Pelibatan pihak atau SDM dalam pengelolaan sistem aplikasi pendataan.
Server Regbastra digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan beberapa aplikasi (VIBA, Dialek, Regbastra) dengan pengembang yang berbeda.	Memisahkan server untuk kebutuhan pengembangan aplikasi yang berbeda.	Penyediaan server yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan aplikasi.

3. Sasaran Kegiatan III Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma new public management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta new public service (governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari penciptaan tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut yaitu dengan cara peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran

3.1. Indikator Kinerja Kegiatan III.1 Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 6.1 Target dan Realisasi IKK
Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	2023	Tahun 2024			Renstra		
				Tar-get	Real-isasi	%	Tar-get	Real-isasi	%
3	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	A	A	A	A	100%	BB	A	120%

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Target nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat tercapai, bahkan melampaui target. Ketercapaian nilai/predikat SAKIP ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

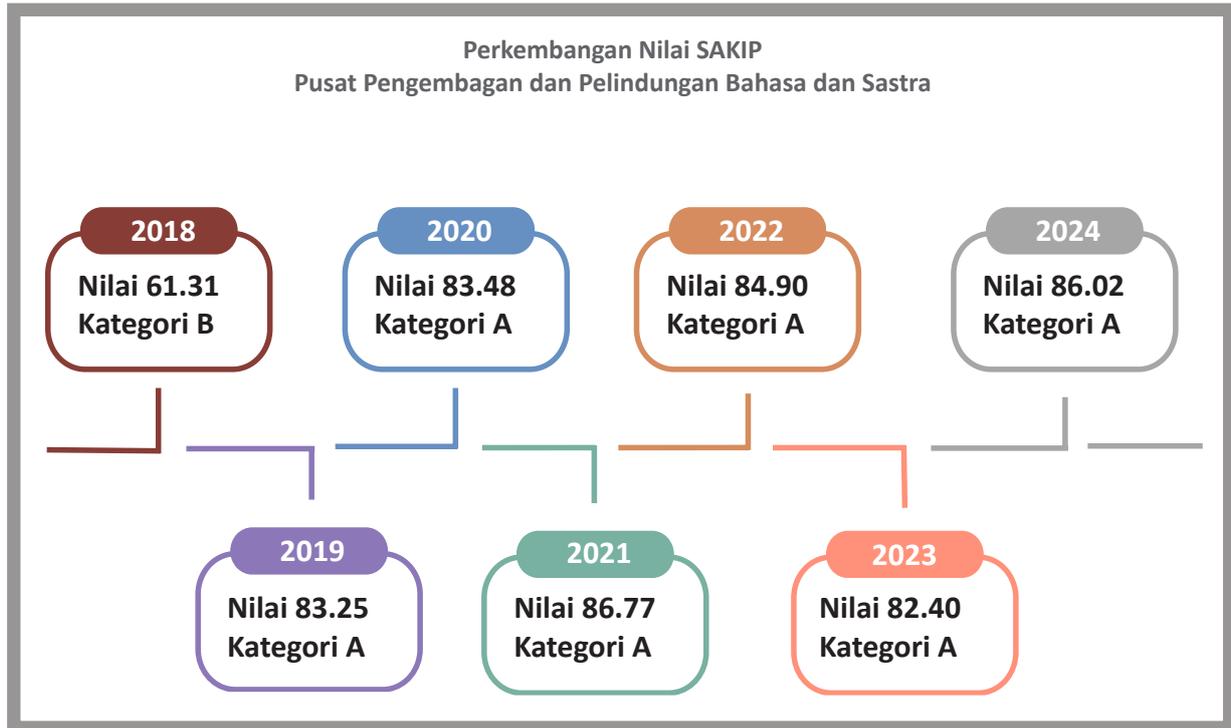
1. Pembahasan draf revisi Renstra Badan Bahasa Tahun 2020—2024 dengan memperhatikan permasalahan pada Renstra terdahulu serta penyederhanaan sasaran dan indikator sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
3. Penyusunan perjanjian kinerja Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Kasubbag Tata Usaha, dan koordinator KKLK;
4. Tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya;
5. Penyusunan SOP pelaporan kinerja dan SOP penyusunan laporan kinerja disertai dengan kegiatan sosialisasi beserta implementasinya;
6. Pengukuran kinerja yang dilakukan, baik setiap bulan maupun triwulan; dan
7. Penyusunan laporan kinerja.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam ketercapaian predikat SAKIP, yaitu kurangnya pemahaman dan perhatian akan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrument evaluasi pada suatu instansi, dan pemahaman subyektif auditor terkait butir evaluasi pada saat penilaian SAKIP.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antisipatif, yang meliputi peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan internal maupun koordinasi dengan pihak eksternal, seperti Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Biro Perencanaan, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Anggaran, dan instansi terkait lainnya. Keikutsertaan staf dalam bimbingan SAKIP yang dilakukan oleh Pusdiklat dan Biro Perencanaan Kemdikbud pun menjadi salah satu upaya dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai pentingnya implementasi SAKIP pun dilakukan kepada internal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di samping itu, pengisian dokumen SAKIP dalam aplikasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal diupayakan agar dapat diisi sesuai periode waktu pengisiannya pada laman SPASIKITA Kemdikbudristek.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target predikat SAKIP satker yaitu:

1. mengevaluasi kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara holistik dan komprehensif setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan.
2. melakukan sosialisasi dan implementasi SAKIP kepada seluruh pegawai dan pimpinan di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
3. melengkapi butir-butir penilaian SAKIP sesuai dengan peraturan terbaru; dan
4. membentuk tim EVALUASI AKIP.



Gambar 6.1 Perkembangan nilai SAKIP

3.2 Indikator Kinerja Kegiatan III.II Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 7.1 Target dan Realisasi IKK
Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	2023	Tahun 2024			Renstra		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3 Meningkatkan tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.2 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	A	91.81	91.85	96.06	102%	91	96.06	101%

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Indikator Perencanaan Anggaran dan Indikator Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun

2023 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Indikator Percapaian Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan Indikator Pelaksanaan Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

$$\text{Nilai NKA} = (50\% * \Sigma[\text{Perencanaan Anggaran}]) + (50\% * \Sigma[\text{Pelaksanaan Anggaran}])$$



Grafik 5.1 Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Hambatan dan permasalahan yang memengaruhi tercapainya target nilai kinerja anggaran yaitu:

- Jadwal yang tidak proporsional dan inkonsistensi pelaksanaan jadwal kegiatan oleh tim; dan
- Kegiatan dan realisasi anggaran baru terealisasi seluruhnya pada akhir tahun.

Strategi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam meningkatkan pencapaian target kinerja nilai kinerja anggaran yaitu:

- Meminimalkan deviasi rencana penarikan anggaran dengan memantapkan jadwal pelaksanaan kegiatan serta penyiapan tim keuangan yang tangguh;
- Penguatan tata kelola keuangan terkait pertanggung jawaban keuangan yang tertib dan lancar disertai dengan peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan; dan
- Pemetaan kegiatan yang menyeluruh dalam rangka menyiapkan data yang valid dan handal bagi pimpinan dalam menentukan/mengambil kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan/anggaran.

Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan cara:

- Mengevaluasi dan mengatur ulang sisa jadwal kegiatan dan peneguran terhadap coordinator kegiatan oleh pimpinan;
- Pimpinan telah menegur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar realisasi output berjalan sesuai rencana dan tidak menumpuk di akhir tahun

B. Realisasi Program dan Agenda Prioritas

Tabel 8.1 Matriks Program Prioritas Nasional dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Program Prioritas Nasional	Rincian Output
1	Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[2021.QMA.001] Produk Kodifikasi Bahasa

Program Prioritas Badan Bahasa	Rincian Output	Target	Realisasi	Pagu	Realiasi
Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[2021.QMA.001] Produk Kodifikasi Bahasa	9	10	19.619.474.000	17.003.855.854

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020--2024 dan mendukung program kementerian melalui Program Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah, dan juga mendukung tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki satu kegiatan atau rincian output (RO) berstatus prioritas nasional yang turut mendukung program prioritas nasional dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Produk Kodifikasi Bahasa yang telah selesai melaksanakan kegiatan pembuatan produk kodifikasi bahasa, yaitu mengumpulkan 80.000 entri baru KBBI. Entri tersebut dicapai melalui kegiatan konsinyasi dan kerja sama dengan beberapa pihak. Konsinyasi inventarisasi kosakata yang dilaksanakan sebanyak 15 kali sepanjang tahun 2024 telah menghasilkan capaian 60.000 entri baru.

Dalam upaya pengembangan kamus, pada tahun 2024 juga dilaksanakan satu kali Sidang Komisi Istilah yang berhasil membahas 2.932 padanan istilah pada bidang Ilmu Geologi, Ilmu Astronomi, Ilmu Pangan Subbidang Industri Pangan, Ilmu Pertahanan Subbidang Industri Pertahanan, Ilmu Pendidikan Subbidang Kebijakan Pendidikan, dan Ilmu Komunikasi Subbidang Penyiaran. Hasil SKI 2024 didokumentasikan dalam bentuk Kamus Bidang Ilmu pada tahun mendatang. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra telah menyelesaikan empat buah kamus bidang ilmu, yakni Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Diplomasi Pertahanan, Kamus Bidang Ilmu Komunikasi Subbidang Hubungan Masyarakat, Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Kurikulum, dan Kamus Bidang Ilmu Pendidikan Subbidang Pengajaran dan Pembelajaran

Untuk memberikan pelayanan terbaik dan menunjang kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan aplikasi kebahasaan, Tim Perkamusan dan Peristilahan terus mengembangkan aplikasi Sistem Penyuntingan Bahasa Indonesia (Sipebi). Aplikasi ini bersifat luring mudah alih (portable) dan dapat diunduh melalui KBBI Daring. Hingga Desember 2024, aplikasi Sipebi sudah diunduh sebanyak 154.604 kali. Fokus utama dalam pengembangan Sipebi tahun 2024 adalah penambahan data kamus Sipebi dan kamus kesalahan Sipebi

C. Realisasi Anggaran

1 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam DIPA awal tahun 2024 adalah sebesar 98.388.516.000,00. Pusbanglin mengalami 12 kali revisi pagu, hingga pagu anggaran terakhir menjadi 85.828.852.000,00.



Gambar 7.1 Perkembangan DIPA Tahun Anggaran 2024

Dari pagu anggaran terakhir tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp79.198.005.8637,00 (data SP2D SAKTI) dengan persentase daya serap sebesar 99,36%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian tiga sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja

Tabel 9.1 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	Rp4.252.061.000	Rp4.206.285.632	98,92%
Belanja Barang	Rp70.660.883.000	Rp70.214.427.522	99,37%
Belanja Modal	Rp4.795.908.000	Rp4.777.292.709	99,61%
Total	Rp79.708.852.000	Rp79.198.005.863	99,36%

Tabel 9.2 Realisasi Anggaran per KRO

	Program / Kegiatan / KRO / RO	Satuan	Pagu	Realisasi	Persentase
Program	[DH] Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		Rp63.934.144.000	Rp63.551.626.157	99,40%
Kegiatan	[2021] Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		Rp63.934.144.000	Rp63.551.626.157	99,40%
KRO	[2021.ABH] Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi Kebijakan	Rp15.191.996.000	Rp15.118.060.379	99,51%

KRO	[2021.BMA] Data dan Informasi Publik	Produk	Rp31.687.334.000	Rp31.429.709.924	99,19%
KRO	[2021.QMA] Data dan Informasi Publik	Produk	Rp17.054.814.000	Rp17.003.855.854	99,70%
Program	[WA] Program Dukungan Manajemen		Rp15.774.708.000	Rp15.646.379.706	99,19%
Kegiatan	[2020] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		Rp15.774.708.000	Rp15.646.379.706	99,19%
KRO	[2020.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	Rp10.978.800.000	Rp10.869.086.997	99,00%
KRO	[2020.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	Rp4.795.908.000	Rp4.777.292.709	99,61%
Total			Rp79.708.852.000	Rp79.198.005.863	99,36%

2 Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 0,64% atau Rp510.846.137,00 dari pagu anggaran sebesar Rp38.608.294.000,00 Hasil efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari:

- Optimalisasi kegiatan pemerikayaan kosakata, Integrasi Produk Kosakata dengan TIK, penyusunan rekomendasi kebijakan pelindungan bahasa dan sastra, dan penyusunan bahan pengembangan sastra dengan sisa anggaran yang ada untuk mencapai target yang telah ditentukan;
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas, meeting dan pembayaran jasa pada kegiatan pemodernan sastra, dan Penyusunan Pedoman Kebahasaan sehingga dapat menghasilkan produk pengembangan bahasa dan sastra yang dapat melebihi target.
- Strategi pelaksanaan kegiatan dengan melalui penggabungan beberapa kegiatan yang memiliki konsep, tema, dan narasumber yang sama

Efisiensi berdampak pada meningkatnya capaian indikator kinerja satker rata-rata 108% yang melebihi dari target yang ditetapkan pada Indikator Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra (102%), indikator Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah (125%), dan indikator Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (104%).

D. Kinerja Lain-lain

1 Reformasi Birokrasi (ZI-WBK)

Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali diberikan kesempatan dalam meraih predikat ZI-WBK setelah sebelumnya pada tahun 2023 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra belum berhasil meraih predikat ZI-WBK, namun sudah melewati penilain dari tim TPI.

Dalam mengawal upaya perbaikan yang berkelanjutan, Pusbanglin menetapkan tim kerja ZI-WBK yang dievaluasi kinerjanya setiap tahun. Di samping itu, sebagai parner model anutan da-

lam menggerakkan perubahan (katalis) dan mediator, Pusbanglin membentuk agen perubahan yang mewakili setiap kelompok kepakaran dan layanan profesional (KKLP) dengan program aksi yang berangkat dari kebutuhan KKLP tersebut sehingga dampak perubahan akan lebih dirasakan, pemberian motivasi melalui kutipan harian, pojok literasi, serta pendampingan dan magang penyusunan kamus bagi UPT Balai/Kantor se-Indonesia. Pusbanglin melalui tim ZI-WBK menetapkan sejumlah program kerja prioritas di setiap area serta program prioritas utama sepanjang 2024 yang dikenal dengan Lima Aksi Spirit Pusbanglin. Lima Aksi Spirit Pusbanglin ini terdiri atas 1) Pusbanglin Mengapresiasi, 2) Pusbanglin Peduli, 3) Pusbanglin Harmonis, 4) Pusbanglin Informatif, dan 5) Pusbanglin Mengabdikan. Secara rinci Lima Aksi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pusbanglin Mengapresiasi memberikan penghargaan setiap bulan kepada 5 orang pegawai terdisiplin dan 5 orang pegawai terbaik dalam pelayanan internal dan eksternal.
2. Pusbanglin Peduli merupakan bentuk kepedulian sosial yang tinggi kepada rekan kerja dan masyarakat yang mengalami musibah. Aksi diwujudkan dalam bentuk bakti sosial, bantuan sosial, tali kasih kedukaan dan tanda kasih selama menginap di rumah sakit.
3. Pusbanglin Harmonis bertujuan untuk mewujudkan suasana kerja yang harmonis yang diwujudkan dalam kolaborasi kegiatan antar-tim dan/atau KKLP/KLA di lingkungan Pusbanglin serta menciptakan momentum khusus kebersamaan di setiap tim kerja, misalnya makan/minum bersama, bertukar kado/bertukar hadiah sederhana (tidak berpotensi gratifikasi).
4. Pusbanglin Informatif yaitu secara giat dan aktif mempublikasikan berita kegiatan, produk dan pelayanannya kepada seluruh warga Pusbanglin serta mitra dan masyarakat melalui media sosial Pusbanglin. Di samping itu, Agen Perubahan dan tim yang bertugas membagikan kutipan (quotes) motivasi kerja setiap hari.
5. Pusbanglin Mengabdikan dilakukan oleh pimpinan beserta seluruh jajarannya mengabdikan diri dengan membawa tanaman dalam pot, buku motivasi berkinerja, dan/atau membagikan ilmu/skil/keterampilan kepada seluruh warga Pusbanglin. Pengabdian ini dikhususkan bagi pimpinan dan pegawai yang terlambat hadir lebih dari satu kali (1x) dalam sepekan.

Namun tahun ini Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra masih belum berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK karena ada beberapa poin yang belum dapat dimaksimalkan, tapi semua upaya akan tetap dipertahankan agar saat mendapatkan kesempatan kembali, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat meraih predikat ZI-WBK

1 Capaian Kinerja Lainnya

a. Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra

Pada zaman modern ini, komunitas sastra di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius sebab banyak komunitas sastra yang keberadaannya tidak menentu, timbul-tenggelam, terutama bagi komunitas sastra yang masih berkembang dan belum mapan. Meskipun demikian, di tengah keterbatasan pendanaan, ternyata masih ada komunitas yang eksis dalam melaksanakan kegiatan kesastraan di tengah masyarakat. Keberadaan komunitas sastra ini perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah agar dapat mengoptimalkan perannya sebagai tempat dan media kreatif bagi sastrawan dan pegiat sastra dalam memproduksi karya sastra atau menyelenggarakan kegiatan kesastraan.

Di samping itu juga, perlu adanya apresiasi bagi para pelaku/pegiat sastra yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menggerakkan, membangun, dan mencipta karya sastra. Pemerintah per-

lu membantu para pelaku/pegiat sastra sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan kesastraan yang telah dilakukannya. Tentu saja, apresiasi dalam bentuk penghargaan ini juga menjadi pemantik pemerintah daerah, lembaga, atau masyarakat setempat untuk dapat lebih menghargai pelaku/pegiat sastra yang ada di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2024 ini melanjutkan kembali program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan peran komunitas sastrasasttra sebagai pihak pemroduksi karya, dan dapat menjadi penggerak sekaligus penguat dalam membangun kesastraan di tengah masyarakat, serta mengembangkan kesastraan dan meluaskan produk karyanya.

Tujuan pemberian Bantuan, adalah sebagai berikut.

1. Bantuan fasilitasi diberikan dalam rangka mendorong berkembangnya komunitas sastra, meningkatkan peran komunitas sastra sebagai sarana pembelajaran sastra, membantu pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan bidang kebahasaan dan kesastraan, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra, serta mendorong jumlah, mutu, serta penyebaran dan publikasi karya sastra.
2. Bantuan penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada komunitas sastra atau perseorangan atas kinerjanya yang luar biasa dalam aktivitas kesastraan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem kesastraan.

Program Bantuan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang terbuka dan transparan, yaitu:

1. tahap pengumuman dan seleksi yang diunggah pada laman Badan Bahasa serta portal Spirit Pusbanglin;
2. tahap seleksi berkas, baik administratif maupun substantif;
3. tahap penilaian substansi dan anggaran oleh dewan juri;
4. tahap pengumuman;
5. tahap pembekalan;
6. pelaksanaan kegiatan Bantuan;
7. pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan
8. pelaporan.



Gambar 8.1 Penampilan Penerima Bantuan Pemerintah

b. Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN)

Sebagai salah satu tahapan dari program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD), festival tunas bahasa ibu nasional (FTBIN) merupakan upaya untuk mempromosikan keragaman bahasa daerah, menyebarluaskan semangat kecintaan dan ekspresi kebanggaan terhadap bahasa daerah, serta sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku RBD, khususnya generasi muda. FTBI di tingkat nasional (FTBIN) ini juga menjadi kegiatan dalam rangka memperingati hari bahasa ibu internasional pada tanggal 21 Februari. Sejak tahun 2023, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan FTBIN yang diikuti oleh tunas bahas ibu yang terpilih dari program RBD tahun 2022. Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali menyelenggarakan FTBIN sebagai bentuk apresiasi atas semangat para generasi muda terbaik penutur bahasa daerah yang telah terpilih dalam FTBI tingkat provinsi pada tahun 2023.

Para peserta FTBIN 2024 merupakan tunas bahasa ibu yang mewakili 72 bahasa daerah yang direvitalisasi pada tahun 2023. Sebanyak 572 peserta dari 25 provinsi terlibat dalam FTBIN 2024. Dalam penyelenggaraan FTBIN ini, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga berkoordinasi dengan 19 UPT yang telah melaksanakan RBD pada tahun 2023, yaitu Balai/Kantor Bahasa Provinsi 1) Aceh, 2) Sumatera Utara, 3) Sumatera Selatan, 4) Lampung, 5) Bengkulu, 6) Jawa Barat, 7) Jawa Tengah, 8) Jawa Timur, 9) Bali, 10) Kalimantan Timur dan Utara, 11) Kalimantan Tengah, 12) Kalimantan Selatan, 13) Sulawesi Selatan dan Barat, 14) Sulawesi Tengah, 15) Nusa Tenggara Barat, 16) Nusa Tenggara Timur, 17) Maluku, 18) Maluku Utara, dan 19) Papua. Selain itu, dalam FTBIN 2024, penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah dari Mendikbudristek diberikan kepada 20 pemerintah daerah (provinsi/kabupatrn/kota) atas dukungan dan kontribusi nyata dalam kesuksesan program RBD di wilayahnya



Gambar 8.2 Acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2024

c. Rapat Koordinasi Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada bulan Mei 2024 di Jakarta yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Rapat dihadiri oleh 160 pimpinan daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan RBD selama 2020–2023. Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dan rangkaian dari pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi bertujuan untuk (1) membangun pemahaman yang sama tentang isu kepunahan bahasa dan program Revitalisasi Bahasa Daerah sebagai bagian dari upaya pelindungan bahasa daerah; (2) meningkatkan kesadaran dan kepedulian; serta peran aktif dan dukungan konkrit para pemangku kepentingan terhadap pelestarian bahasa daerah; (3) menguatkan kerja sama serta sinergi dengan para kepala daerah di 38 provinsi dalam pelestarian bahasa daerah melalui Program Revitalisasi Bahasa Daerah yang tertuang dalam Program Merdeka Belajar Episode ke-17.

Rapat koordinasi didesain dalam bentuk diskusi panel narasumber dan diskusi kelompok. Terdapat dua kali diskusi panel dengan narasumber utama terkait kebijakan dan praktik baik dalam implementasi pelindungan bahasa dan sastra di daerah, yaitu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas; Plt. Direktur SUPD IV Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; serta Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta.

Rapat koordinasi juga mengagendakan diskusi kelompok yang membagi peserta ke dalam kelompok isu-isu besar terkait permasalahan bahasa daerah, kepunahan bahasa dan penanganannya berdasarkan karakter daerah atau wilayah kerja. Di samping itu, di akhir sesi rapat koordinasi dilakukan penandatanganan komitmen/rekomendasi hasil rapat koordinasi oleh para kepala daerah dan/atau yang mewakili.

Kegiatan tersebut telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut.

1.	Terkoordinasi sejumlah program pelindungan bahasa dan sastra yang dapat diimplementasi di wilayah kerja pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
2.	Terkomunikasikannya empat isu (topik) besar dalam pelindungan bahasa dan sastra, yaitu isu penganggaran, regulasi, permasalahan penanganan bahasa daerah di wilayah, serta permasalahan pengajar bahasa daerah.
3.	Tersusunnya rumusan rekomendasi sebagai hasil rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, pimpinan satuan kerja UPT balai/kantor bahasa beserta pimpinan pemerintah daerah dan/atau yang mewakili sebagaimana berikut.



Gambar 8.3 Rapat Koordinasi Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah

E. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1 Inovasi

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan inovasi sebagai berikut

a. Cerita Bergambar Berbasis Manuskrip

Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra membuat inovasi dengan memproduksi cerita bergambar yang diadaptasi dari manuskrip. Cerita bergambar tersebut diberi judul Hikayat Raja Putri. Kumpulan kisah tersebut diadaptasi dan diinspirasi oleh manuskrip Hikayat Raja Budak. Terdapat kisah yang dijadikan cerita bergambar untuk anak-anak jenjang B, yaitu umur 6–9 tahun. Ke-61 cerita yang ditampilkan berkisah tentang adab, kebaikan, hubungan antara orang tua dan anak, hingga tentang kuliner disajikan dalam gambar yang menarik dan mudah dimengerti oleh anak-anak.

Dampaknya, selain melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya melalui manuskrip lama, cerita bergambar ini juga berperan dalam membentuk karakter anak sejak dini. Melalui cerita yang mengangkat nilai-nilai positif, anak-anak dapat belajar tentang pentingnya menghormati orang lain, menjaga hubungan keluarga, serta menghargai budaya lokal. Inovasi ini dimanfaatkan oleh pendidik, orang tua, dan masyarakat luas sebagai media pendidikan yang kreatif dan menyenangkan. Dengan pendekatan visual yang menarik, Hikayat Raja Putri tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menghibur, sehingga menjadi sarana pembelajaran budaya yang efektif untuk anak-anak Indonesia.

b. Komik Serial Cerita Rakyat dari 38 Provinsi

Pada tahun 2024, Pusbanglin meluncurkan inovasi unik dalam dunia literasi anak dengan menyusun 114 judul komik serial berbasis cerita rakyat dari 38 provinsi di Indonesia. Komik ini diberi nama Komik Seri Kembara Lingua dan menghadirkan lima tokoh utama, yaitu Kak Tari, Gebe, Balau, Bone, dan Mala, sebagai pengikat jalannya cerita. Inovasi ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal melalui medium visual yang menarik, khususnya untuk pembaca jenjang C (anak usia 10–13 tahun). Dengan mengangkat kekayaan cerita rakyat dari berbagai daerah, komik ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media edukasi yang mendalam tentang nilai-nilai budaya Nusantara.

Dampak dari inovasi ini sangat signifikan, terutama dalam memperkaya bahan bacaan alternatif bagi anak-anak. Visualisasi yang menarik dalam komik dapat meningkatkan minat baca anak, sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi muda. Selain itu, Komik Seri Kembara Lingua juga membantu menjaga keberagaman budaya Indonesia tetap hidup di era modern yang serba digital. Komik ini dimanfaatkan oleh pelajar jenjang C, guru, dan orang tua sebagai alat bantu pendidikan yang menyenangkan. Dengan hadirnya inovasi ini, Pusbanglin berkontribusi besar dalam mengembangkan literasi budaya, sekaligus membangun rasa cinta anak-anak terhadap warisan budaya bangsa.

2 Penghargaan

a. Inventarisasi Kosakata

Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil mendapatkan ucapan terima kasih dari UIN Sunan Ampel karena sudah dilibatkan dalam pencapaian penambahan 200.000 entri KBBI melalui kegiatan inventarisasi kosakata.



Gambar 9.1 Piagam Ucapan Terima Kasih terkait pelibatan kegiatan inventarisasi kosakata

b. Laboratorium Kebinekaan.

Pada tahun 2024 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih dari Sekolah Islam Terpadu Ad-Salaam, SD Negeri Puspasari, dan Universitas Sampoerna karena sekolah mereka telah mendapatkan materi tentang keanekaragaman bahasa dan sastra di Indonesia melalui kunjungan ke Laboratorium Kebinekaan



Gambar 9.2 Piagam Ucapan Terima Kasih untuk Laboratorium Kebinekaan

3. Program Kolaborasi/Collaborative

Program kolaborasi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2024 dalam hal pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra adalah sebagai berikut.

a. Penambahan 200.000 Entri KBBI

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan beberapa program kolaborasi untuk mendukung upaya percepatan penambahan entri KBBI sebanyak 200.000 entri. Salah satunya adalah melalui rekrutmen editor eksternal KBBI, yang bertugas untuk mengusulkan masing-masing 1000 entri baru untuk KBBI. Selain itu, dalam rangka menunjang kegiatan pengusulan entri turunan, telah dilaksanakan tiga (3) kegiatan pembekalan editor KBBI yang melibatkan 180 mahasiswa dari 18 universitas yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dalam program ini, setiap mahasiswa diberi materi pembekalan dari pakar di bidang terminologi dan leksikografi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara mengusulkan entri baru. Di akhir periode kegiatan, setiap mahasiswa diharapkan untuk mengusulkan 50 kata turunan yang layak dimasukkan ke dalam KBBI



Gambar 10.1 Kegiatan Konsinyasi III Inventarisasi kosakata

Program kolaborasi lain yang dilakukan Tim Perkamusan dan Peristilahan dalam upaya pencapaian target adalah kerja sama trilateral antara Tim Perkamusan dan Peristilahan (Badan Bahasa) dengan OUP dan Lexicom. Dalam kerja sama ini, OUP dan Lexicom memberikan data calon kosakata baru dari data korpus bahasa Indonesia yang telah ditapis dari data KBBI. Lexicom juga memberikan akses penggunaan platform Lexonomy bagi Tim Perkamusan dan Peristilahan untuk menyeleksi dan menyunting calon kosakata baru, sebelum akhirnya siap dimasukkan secara otomatis ke dalam KBBI



Gambar 10.2 Pertemuan dengan tim OUP dan Lexicom

b. Penghitungan Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah

Sejak tahun 2020, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi penyusunan Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah (IPBD). Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah merupakan indeks yang menggambarkan upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa daerah, baik perseorangan maupun kelompok untuk mempertahankan keberadaan bahasa daerahnya dengan cara menggunakan bahasa daerah tersebut dalam berbagai ranah, yaitu dalam berkomunikasi dengan keluarga, kebijakan di ranah pendidikan, dan gerakan di masyarakat. Variabel yang digunakan untuk menghitung pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya adalah

1. jumlah penutur bahasa daerah,
2. jumlah bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal,
3. jumlah guru bahasa daerah,
4. jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan, dan
5. jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik.

Dalam penghitungan IPBD tersebut, Badan Bahasa bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan penghitungan variabel pertama, yaitu jumlah penutur bahasa daerah. Jumlah penutur bahasa daerah dari data BPS berupa hasil perhitungan jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari dalam keluarga, tetangga, dan warga masyarakat. Pendataan dilakukan melalui pertanyaan dalam Long Form Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Hasil perhitungan Sensus Penduduk tersebut kemudian diolah oleh BPS dan dilaporkan kepada Badan Bahasa.

c. Pemutakhiran Aplikasi VIBA Berbasis AI

Vitalitas bahasa (VIBA) merujuk pada tingkat keberlangsungan atau daya hidup suatu bahasa dalam masyarakat. Vitalitas bahasa menjadi bagian dari studi tentang konteks penggunaan bahasa dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan upaya pelindungan atau pelestarian bahasa. Untuk mengetahui kondisi bahasa daerah, pengukuran daya hidup bahasa dilakukan melalui aplikasi VIBA. Pengukuran daya hidup bahasa merupakan bagian integral dari upaya pelindungan bahasa daerah.

Melalui pengukuran ini, status atau kategori daya hidup bahasa daerah dapat diketahui sehingga kebijakan mengenai pelindungan bahasa daerah dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Pengukuran daya hidup bahasa dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, penginputan, dan penghitungan data indeks untuk mengetahui status daya hidup suatu bahasa berdasarkan sepuluh faktor yang memengaruhinya. Proses dari setiap tahapan tersebut sebelumnya masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia (petugas lapangan) sehingga tidak efektif dan efisien. Kuesioner masih berbasis kertas sehingga pengisian kuesioner berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan pengisian dalam petunjuk teknis. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dengan Politeknik Statistika STIS untuk memutakhiran aplikasi VIBA yang semula menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) menjadi aplikasi VIBA berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence), yaitu otomatisasi interview berbasis chatbot VIBA dengan pemanfaatan generative AI dan large language model (LLM). Dengan menggunakan teknologi ini, chatbot dapat berinteraksi langsung dengan responden melalui percakapan otomatis dan data dapat dikumpulkan secara cepat dan akurat tanpa

memerlukan kehadiran fisik petugas. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan data, tetapi juga dapat memperluas cakupan sampel, dan mengurangi biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk tenaga kerja dan logistik.



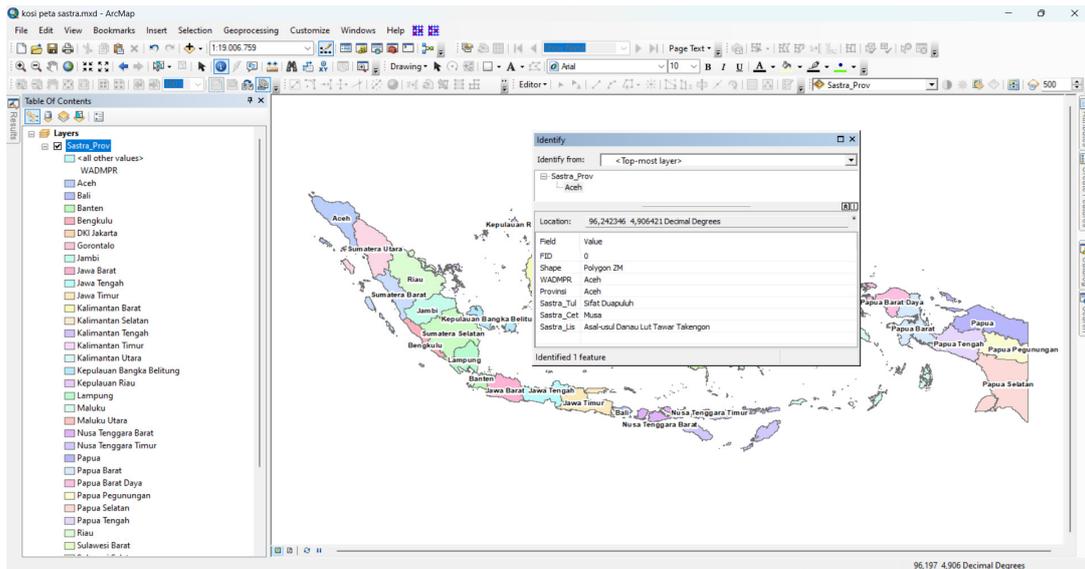
Gambar 10.3 Pembahasan Pemutakhiran VIBA Berbasis AI oleh STIS

d. Penamaan Tempat dan Visualisasi Peta Digital

Secara umum, penamaan tempat atau toponimi berfokus pada pemberian nama-nama tempat, apa arti di balik nama tersebut, serta bagaimana nama-nama ini berubah seiring waktu. Nama-nama tempat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, bahasa, serta kondisi alam setempat. Misalnya, nama sebuah desa dapat berasal dari nama seorang tokoh sejarah atau bisa pula berkaitan dengan ciri khas alam. Toponimi juga mempelajari bagaimana nama-nama ini disebarluaskan atau disesuaikan dengan perubahan dalam bahasa dan masyarakat. Toponimi tidak hanya melihat nama tempat secara statis, tetapi juga mengkaji bagaimana nama-nama itu berkembang seiring waktu dan memberikan informasi terkait konteks sejarah, sosial, dan budaya suatu wilayah.

Badan Informasi Geospasial (BIG) berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan toponimi. BIG bekerja untuk menyusun, mengelola, dan menyediakan data serta informasi terkait nama tempat di Indonesia melalui sistem yang terstandarisasi dan bertanggung jawab untuk menetapkan standar penulisan nama tempat di Indonesia. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk menetapkan sebuah nama pada suatu tempat yang mencakup penulisan, pelafalan, dan penggunaan nama geografis dengan cara yang benar.

Kolaborasi dan kerja sama lain yang dilakukan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan BIG adalah visualisasi peta digital bahasa dan sastra. Dalam penyusunan peta bahasa, BIG berperan menyediakan peta dasar dan persebaran wilayah tutur bahasa daerah. Selain itu, dalam penyusunan peta sastra, BIG berperan sebagai konsultan/tim ahli yang memberi masukan dan usulan untuk visualisasi peta sastra digital yang kemudian akan dikerjakan oleh pihak ketiga. Usulan visualisasi peta sastra digital dari BIG adalah sebagai berikut.



Gambar 10.4 Visual Peta Digital

e. Penyusunan Korpus Indonesia (Koin)

K-Soft merupakan perusahaan jasa penyedia perangkat lunak yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengelola dan mengolah data bahasa daerah secara efektif. Dengan dukungan algoritma canggih, K-Soft mampu memetakan pola penggunaan bahasa daerah dan mengintegrasikannya ke dalam sistem penyusunan korpus. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengelompokan, dan analisis kosakata dari berbagai sumber rujukan, seperti manuskrip kuno, kamus, serta teks sastra. Keandalan perangkat lunak K-Soft diharapkan dapat memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian bahasa daerah.

Kerjasama antara K-Soft dan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tidak hanya berfokus pada pelestarian bahasa daerah, tetapi juga pada pengembangan sumber daya digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam jangka panjang, proyek ini bertujuan untuk memperkuat upaya pelindungan bahasa daerah yang terancam punah serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Dengan pangkalan data Korpus Indonesia yang terus diperbarui, diharapkan bahasa daerah dapat tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi.



Gambar 10.5 Kegiatan penyusunan Korpus Indonesia

f. Perpustakaan Nasional

Kerjasama antara Badan Bahasa dan Perpustakaan Nasional pada tahun 2024 ini dijalin untuk hal penyediaan data dan informasi beberapa kegiatan di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Kegiatan tersebut meliputi:

1) Korpus Bahasa Daerah

Korpus adalah kumpulan teks alami, baik lisan maupun tulis, yang disusun secara sistematis sebagai sumber data untuk melatih model kecerdasan buatan agar memahami dan memproses bahasa manusia. Inisiatif ini bertujuan mendokumentasikan, mempelajari, dan melestarikan bahasa daerah, terutama yang terancam punah. Penyiapan korpus bahasa daerah menjadi langkah penting untuk mengamankan unsur-unsur vital suatu bahasa sebelum benar-benar punah. Korpus mencakup dokumentasi komprehensif meliputi tata bahasa, kosakata, hingga konteks penggunaannya. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti bahan ajar, media berbahasa daerah, dan program pendidikan berbasis bahasa lokal. Selain itu, korpus ini mendukung pengajaran bahasa daerah di sekolah agar lebih efektif, membantu bahasa daerah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan memperluas penggunaannya melalui media massa. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, korpus bahasa daerah juga berperan penting dalam menciptakan sumber daya digital yang mendukung pelestarian bahasa secara berkelanjutan. Perpustakaan Nasional berperan sebagai penyedia data set dan/atau infrastruktur digital, bekerja sama dengan pengembang pihak ketiga dalam pengembangan perangkat lunak dan teknologi AI untuk mendukung penyusunan korpus bahasa daerah.

2) Manuskrip Hikayat Raja Budak

Perpustakaan Nasional menjadi tempat untuk memperoleh data mengenai manuskrip Hikayat Raja Budak koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia dengan kode V.d.W. 153 suntingan Dra. Jumsari Jusuf yang diterbitkan tahun 1982 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Suntingan tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan cerita bergambar untuk pembaca umur 6--9 tahun seri Hikayat Raja Putri berbasis manuskrip Hikayat Raja Budak



Gambar 10.6 Kunjungan untuk melihat manuskrip

3) Data majalah era 1950-an

Perpustakaan Nasional menjadi tempat sumber data rujukan koleksi arsip yang lengkap, termasuk karya sastra yang diterbitkan pada masa 1950-an. Dengan demikian, hasil pengumpulan data ini dapat disusun menjadi sebuah antologi cerita pendek yang menggambarkan kecenderungan sastra dan memotret perkembangannya pada dekade tersebut. Selain itu, antologi cerpen juga menjadi referensi penting bagi peneliti, pelajar, dan penggemar sastra untuk memahami kekayaan sastra Indonesia pada era 1950-an. Ini juga dapat memperkaya kajian sastra Indonesia modern.

g. Penyusunan Produk Pemodernan Sastra

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra kembali melakukan pembuatan produk pemodernan sastra. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pusbanglin tidak lagi membuat film animasi melainkan membuat komik dan cerita bergambar yang bersumber dari cerita rakyat berupa sastra lisan dan manuskrip. Dalam pembuatannya, Pusbanglin bekerja sama dengan para praktisi yang tergabung dalam Asosiasi Komik Indonesia (AKSI). Asosiasi Komik Indonesia merupakan asosiasi yang beranggotakan studio dan perusahaan yang mengembangkan HAKI berbasis karakter dan komik. Asosiasi ini dideklarasikan oleh para pengelola intellectual property (IP) tanah air, baik komikus maupun perusahaan, yang berfokus pada media komik, di antaranya adalah Bumilangit (pemilik IP karakter-karakter komik lokal legendaris, seperti Si Buta, Gundala, Godam, dll.), PIONICON (Si Juki), Octopus Garden (Mice Cartoon), Infia (Komikin Ajah), FrankKomiK (Setan Jalanan), Skylar Komik (Volt & Valentine), Ciayo Comics (Heartbeat & Blue Serenade), re:ON Comics (Grand Legend Ramayana & Galauman), Kosmik (Manungsa & Wanoja), dan Padma Pusaka (Nusa Five). Visi dari AKSI ialah menjadikan industri komik Indonesia sebagai bagian dari strategi budaya nasional di ranah internasional dan dapat membangun ekosistem industri komik Indonesia. Dalam pembuatan produk pemodernan sastra tersebut, AKSI berperan sebagai narasumber dalam penyusunan desain produk dan tim ahli dalam pembuatannya. Pusbanglin juga meminta rekomendasi studio komik dan ilustrator yang dapat terlibat dalam pembuatan komik dan cerita bergambar melalui AKSI.



Gambar 10.7 Diskusi Penyusunan Produk Pemodernan Sastra

h. Partisipasi Pusbanglin dalam Indonesia Comic Con 2024

Sebagai bentuk penyebarluasan ide, gagasan, serta mempublikasikan produk pemodernan sastra berupa komik dan cerita bergambar, Pusbanglin melakukan kerja sama dengan Asosiasi Komik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk meluncurkan 114 judul komik dan 61 cerita bergambar dalam kegiatan Indonesia Comic Con 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Centre pada 9–10 November 2024. Indonesia Comic Con adalah acara tahunan yang merayakan budaya pop dalam berbagai bentuknya termasuk komik, film, televisi, anime, dan permainan. Diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2025, acara ini menarik penggemar budaya pop dari seluruh Indonesia dan menyediakan platform untuk berbagi kecintaan terhadap hiburan dengan komunitas yang sama.

Dalam even tersebut, Pusbanglin dapat memamerkan 175 produk pemodernan sastra berupa komik dan cerita bergambar serta berkesempatan untuk memperkenalkan program dan visi pembuatan produk tersebut kepada khalayak yang hadir dalam Indonesia Comic Con 2024.



Gambar 10.8 Pameran Produk Pemodernan Sastra di acara Comic Con



Gambar 10.9 kunjungan Wakil Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif, Irene Umar

Selain dapat memamerkan karyanya, Pusbanglin juga berkesempatan untuk meluncurkan secara resmi produk pemodernan sastra di Wondr Stage pada Minggu, 10 November 2024 pukul 11.00 WIB.



Gambar 10.11 Peluncuran Produk Pemodernan Sastra

i. Penyusunan Bahan Pengayaan Laboratorium Kebinekaan (Loka Mantra)

Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra (Lab Bineka) menyajikan informasi tentang kebinekaan bahasa dan sastra di Indonesia. Laboratorium ini menyajikan keberagaman bahasa dan sastra daerah di seluruh Indonesia melalui koleksi bahan pengayaan. Dalam menyusun desain bahan pengayaan yang menarik, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dengan Loka Mantra. Adapun bahan pengayaan yang tersusun di tahun 2024 mencakup lembar aktivitas kelas dini, dasar, menengah, dan umum; paparan interaktif kelas dini, dasar, menengah dan umum; gim edukatif; serta bahan media sosial yang berisi konten tentang bahasa daerah, komunitas sastra, manuskrip, dan sastra lisan.



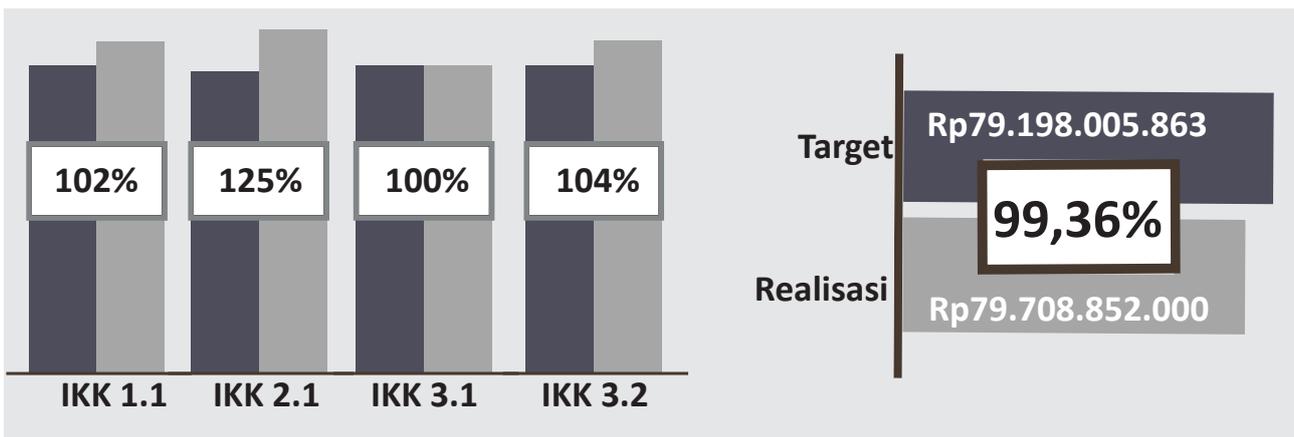
Gambar 10.12 Kegiatan Penyusunan Bahan Pengayaan Laboratorium Kebinekaan

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan kinerja disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Pengembangan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditetapkan 3 sasaran kegiatan (SK) dan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK), dengan pencapaian 4 IKK melebihi target,. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



B. Fokus Perbaikan

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh berbagai faktor. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2024 telah berupaya secara maksimal melakukan peningkatan kinerja melalui berbagai macam metode. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama pimpinan dan seluruh staf pegawai.

Beberapa hal yang sudah dilakukan di tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari fokus perbaikan yang dituangkan di Laporan Kinerja tahun 2023, antara lain:

1. Melakukan rapat bersama pada awal tahun untuk mereviu kegiatan di tahun sebelumnya dan membahas langkah yang akan dilakukan di tahun berjalan.
2. Melakukan rapat berkala setiap triwulan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan membahas langkah dalam pencapaian target.
3. Melakukan pengajuan peningkatan kompetensi ke Sekretariat Badan Bahasa.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal perlu mendapat perhatian dan beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan kinerja organisasi antara lain:

1. Memantapkan konsep dan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan, dan pakar/narasumber.
2. Membangun komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan yang relevan
3. Mengintensifkan kolaborasi dengan melibatkan unsur-unsur pentaheliks (pemerintah, akademi-si, badan usaha/industri, masyarakat/komunitas, dan media).
4. Melakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksana kegiatan dengan tim administrasi Tata Usaha.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring progres pelaksanaan program kegiatan dan anggaran secara berkala setiap akhir bulan.
6. Peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai baik teknis maupun administrasi

LAMPIRAN

- Perjanjian kinerja Awal
- Perjanjian Kinerja Akhir
- Pengukuran Kinerja
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja
- SK Tim Reviu Laporan Kinerja
- Lembar Kerja Reviu Laporan Kinerja
- Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

PERJANJIAN KINERJA AWAL



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Budi Utomo

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 196711161992031001

Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	181
[2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	[2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	8
[3.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	A
[3.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91.85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 15.009.258.000,-
2.	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 83.379.258.000,-
Total Anggaran			Rp. 98.388.516.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PERJANJIAN KINERJA AKHIR



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Budi Utomo
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : E. Aminudin Aziz
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bogor, 12 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
E. Aminudin Aziz

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Imam Budi Utomo



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	181
[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	Model	8
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	A
	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91.85

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp 16.277.291.000
2	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp 69.551.561.000
Total Anggaran			Rp 85.828.852.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Badan Pengembangan dan
 Pembinaan Bahasa
 E. Aminudin Aziz

Bogor, 12 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Pusat Pengembangan dan
 Pelindungan Bahasa dan Sastra
 Imam Budi Utomo



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



PENGUKURAN KINERJA



Laporan Kinerja Triwulan 4 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra				
[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	181	Produk	181	188
[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah				
[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	8	Model	8	10
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra				
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	A	Predikat	A	A
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91.85	Nilai	91.85	95.07

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Progress/Kegiatan

Terkait Produk pemodernan sastra yang ditargetkan 172 tercapai melebihi target, yaitu 175.

Komik

- Seluruh tahapan pembuatan 114 Komik sudah selesai.
- 114 komik sedang diajukan untuk pengusulan ISBN.

Cergam

- Dikerjakan oleh 4 studio, yaitu Tooliq, Kisai, Comxnaut, dan Octopus.
- Semua tahapan pembuatan 61 komik telah diselesaikan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

3. 61 cerita bergambar telah diajukan untuk pengusulan ISBN.

Terkait produk kodifikasi bahasa yang ditargetkan 9 produk, dapat tercapai 13 produk

- KBBI tercapai melebihi target.
- Kamus Bidang Ilmu tercapai 4 kamus.
- Kamus Etimologi tercapai 3 kamus.
- Penulisan Tata Bahasa Indonesia Kontemporer: Sintaksis tercapai.
- SKBD terlaksana seluruhnya
- Pemutakhiran Sipebi terlaksana
- Pemutakhiran aplikasi KBBI terlaksana
- Sidang Komisi Istilah terlaksana

Kendala/Permasalahan

1. Masing-masing studio (19 studio) memiliki mekanisme kerja yang unik sehingga waktu penyelesaian tidak seragam.
2. Penyesuaian 2 halaman komik dan halaman tambahan cergam dengan perubahan nama kementerian dan perubahan halaman tambahan.
3. Pengajuan ISBN yang terkendala dengan penyesuaian beberapa halaman tambahan.
4. efisiensi anggaran mendadak dari Menkeu yg menyebabkan konsinyasi IV Sipebi tidak terlaksana.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memantau dan memberikan pendampingan pada studio agar mekanisme yang berlainan tidak menimbulkan gap yang cukup jauh dalam penyelesaian pekerjaan.
2. Melakukan konsultasi dengan tim KKLP Literasi dalam pengajuan ISBN
3. Mengurangi target pengerjaan Sipebi.

[SK 2] Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah **[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah**

Progress/Kegiatan

Pada TW IV dilakukan finalisasi dan pengesahan model perlindungan bahasa dan sastra. Capaian pada 2024 melebihi target yang ditetapkan, yaitu dihasilkan 10 Model Pelindungan Bahasa dan Sastra.

- 1) Risalah Kebijakan: RBD Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah.

- Risalah telah tersusun dan dicetak terbatas. Tersedia juga dalam bentuk softfile.
- Bahan cetakan telah dibagikan ke acara/kegiatan terkait dengan perlindungan bahasa.

- 2) Juknis Kemah Cerpen.

- Juknis sudah dimutakhirkan dan digunakan oleh UPT untuk melaksanakan Kemah Cerpen 2024.
- Juknis telah disahkan oleh pimpinan.

- 3) Juknis Festival Teater.

- Juknis telah dimutakhirkan dan digunakan UPT untuk melaksanakan Festival Teater



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



- Berbahasa Daerah Tahun 2024.
- Pemutakhiran juknis dilakukan berdasarkan masukan para pakar.

4) Pedoman Konservasi Bahasa

- Pedoman telah diberi masukan oleh pakar dan tahap penyuntingan dan perbaikan tata letak.
- Saat ini menunggu masukan dan pengesahan pimpinan.

5) Rancangan Induk Peta Kebinekaan Bahasa, Sastra, dan Aksara: Rencana Induk Pemetaan Bahasa 2024--2029

- Draf telah mendapat masukan pakar.
- Masih ada beberapa hal yang masih harus didiskusikan secara internal.

6) Draf Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelestari Bahasa dan Sastra Daerah

- Draf telah mendapat masukan pakar.
- Juknis sedang masih disunting dan diatur tata letak sebelum disahkan oleh pimpinan.

7) Digitalisasi Pemetaan Bahasa berbasis AI oleh pihak pengembang.

- Beberapa data fisik masih dipegang rekan pemetaan bahasa yang pindah ke BRIN.
- Harus ada campur tangan pimpinan untuk mengeksekusi pengambilan data tersebut dengan bersurat antareselon.
- Pengecekan data fisik yang ada di ruang arsip untuk mencocokkan dengan data yang ada di pihak pengembangan untuk mengetahui kerumpangan data.

8) Proses pengajuan proposal rancangan aplikasi Vitalitas Bahasa berbasis AI oleh pihak pengembang.

- Proposal sudah diajukan oleh pihak pengembang.
- Uji coba belum dilakukan secara luas padahal UPT sudah sangat menunggu peluncuran aplikasi ini sebelum melakukan RBD.

9) Draf Pedoman Pemetaan Aksara

- Draf sudah tersusun.
- Draf masuk tahap penyuntingan dan tata letak.

10) Pedoman Konservasi Manuskrip Kuno

Kendala/Permasalahan

1. Ada pedoman yang masih menunggu masukan dan pengesahan dari pimpinan.
2. Ada masukan terhadap Pedoman dan juknis yang sudah disahkan dan sudah digunakan (kemah Cerpen) oleh UPT.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menjadwalkan diskusi langsung dengan pimpinan untuk memberikan penjelasan singkat mengenai urgensi setiap dokumen.
2. Mendata masukan dari UPT terhadap pedoman dan juknis yang sudah digunakan agar dapat didiskusikan dan dimutakhirkan.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra**

Progress/Kegiatan

Dalam mendukung pencapaian Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, sudah diikuti kegiatan:

- Rapat Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 26—29 Oktober 2024
- kegiatan Finalisasi Penilaian SAKIP Tahun 2024 pada Selasa—Jumat, 5—8 November

Kendala/Permasalahan

- Masih terdapat anggota tim SAKIP yang belum mengikuti Diklat SAKIP
- Masih terdapat pegawai yang kurang memahami penilaian AKIP

Strategi/Tindak Lanjut

- Mengajukan Diklat SAKIP melalui Sekretariat Badan
- Melakukan sosialisasi terkait Penilaian AKIP dengan mengundang Inspektorat jenderal

**[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra**

Progress/Kegiatan

Dalam mendukung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, sudah diikuti kegiatan:

- Rapat Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 26—29 Oktober 2024
- Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2024, 19--22 November 2024
- Rapat Mitigasi Risiko Triwulan IV, pada 9 Desember 2024

Nilai ini didapat dari Aplikasi MONEV KEMENKEU (Smart DJA) pada tanggal 31 Desember 2024

Kendala/Permasalahan

Terdapat keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan karena adanya laporan kegiatan yang belum diselesaikan dan aplikasi yang terkadang eror

Strategi/Tindak Lanjut

Mengingatkan secara berkala untuk menyelesaikan laporan kegiatan agar penyelesaian administrasi dapat segera dituntaskan

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

**[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra**

Progress/Kegiatan

Dalam mendukung pencapaian Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, sudah diikuti kegiatan:

- Rapat Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 26—29 Oktober 2024
- kegiatan Finalisasi Penilaian SAKIP Tahun 2024 pada Selasa—Jumat, 5—8 November

Kendala/Permasalahan

- Masih terdapat anggota tim SAKIP yang belum mengikuti Diklat SAKIP
- Masih terdapat pegawai yang kurang memahami penilaian AKIP

Strategi/Tindak Lanjut

- Mengajukan Diklat SAKIP melalui Sekretariat Badan
- Melakukan sosialisasi terkait Penilaian AKIP dengan mengundang Inspektorat jenderal

**[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra**

Progress/Kegiatan

Dalam mendukung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, sudah diikuti kegiatan:

- Rapat Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 26—29 Oktober 2024
- Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2024, 19--22 November 2024
- Rapat Mitigasi Risiko Triwulan IV, pada 9 Desember 2024

Nilai ini didapat dari Aplikasi MONEV KEMENKEU (Smart DJA) pada tanggal 31 Desember 2024

Kendala/Permasalahan

Terdapat keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan karena adanya laporan kegiatan yang belum diselesaikan dan aplikasi yang terkadang eror

Strategi/Tindak Lanjut

Mengingatkan secara berkala untuk menyelesaikan laporan kegiatan agar penyelesaian administrasi dapat segera dituntaskan

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



c. Lakukan koordinasi antara tim teknis dan administrasi.

IKK 3.2

- a. Pertahankan untuk terus melakukan dan menyelesaikan kedelapan indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar.
- b. Pertahankan untuk terus melakukan proses evaluasi kinerja anggaran secara bertahap dan berkelanjutan.

Bogor, 31 Desember 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Imam Budi Utomo
---	--



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA
Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telepon: (021) 29099245, 29099247; Laman: spiritpusbanglin.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 0471/I2/PR.06.00/2024

TENTANG
TIM PELAPORAN
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyatakan bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi, diantaranya, (a) penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; (b) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; (c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan untuk meningkatkan kualitas rencana, program, dan anggaran agar lebih efektif dan efisien perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 6 April 2023 Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6094/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Pembentukan Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun Anggaran 2024;
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terkait dengan Pelaporan berbasis Kelompok Kepakaran Layanan Profesional(KKLP):
- Kedua : Tim Pelaporan bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini serta melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- Ketiga : Tim Pelaporan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bertugas selama satu tahun anggaran;

- 3 -

Keempat ; Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 25 Maret 2024
Kepala,



Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusbanglin
2. Yang Bersangkutan

- 4 -

Lampiran: 1

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 0471/I2/PR.06.00/2024

Tanggal : 25 Maret 2024

Tentang : Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

SUSUNAN TIM PELAPORAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NO	NAMA	NIP	AREA LAYANAN
1.	Wahyu Dwi Nuryanto	199604152022031008	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2.	Rinda Yosa	199202042019022007	KKLP Perkamusan dan Peristilahan
3.	Purwaning Linanda Ratnasari	198802242022032003	KKLP Perkamusan dan Peristilahan
4.	Retno Handayani	198605252009122004	KKLP Pelindungan dan Pemodernan
5.	Evi Noviani S	199011032019022004	KKLP Pelindungan dan Pemodernan

- 5 -

Lampiran: 2

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 0471/I2/PR.06.00/2024

Tanggal : 25 Maret 2024

Tentang : Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

TUGAS TIM PELAPORAN	
Pertama	Mengidentifikasi permasalahan program dan anggaran di lingkungan Pusat
Kedua	Menyampaikan dokumen reviu usulan rencana kerja (renja) Pusat yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja (KAK), rancangan anggaran biaya (RAB), dan data dukung yang diperlukan sebagai bahan penentuan angka dasar t+1
Ketiga	Menindaklanjuti hasil penetapan Pagu Indikatif (PI) dengan mereviu untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran t+1
Keempat	Menindaklanjuti hasil penetapan Pagu Anggaran (PA) dengan mereviu untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran t+1
Kelima	Menindaklanjuti hasil penetapan Alokasi Anggaran (AA) dengan mereviu untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran t+1
Keenam	Menyusun usul konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan di Pusat
Ketujuh	Mengkoordinasikan usul konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Pusat sebagai petunjuk operasional kegiatan
Kedelapan	Menyusun draf renstra Pusat dan usul revisi program, kegiatan, dan anggaran Pusat (T 0 dan T+1)
Kesembilan	Berkoordinasi dengan petugas teknis Pusat dalam rangka sinkronisasi ketepatan rencana dan anggaran
Kesepuluh	Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Pusat melalui aplikasi SPASIKITA (SIMPROKA), paling lambat tanggal 16 setiap bulan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. https://spasikita.kemdikbud.go.id/
Kesebelas	Melakukan pengisian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Akhir, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Mandiri pada aplikasi SPASIKITA (KINERJA)
Keduabelas	Melakukan pemantauan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA. https://smart.kemenkeu.go.id/
Ketigabelas	Melakukan pemantauan capaian kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas PP 39. https://e-monev.bappenas.go.id/
Keempatbelas	Menyusun laporan triwulan dalam bentuk pengukuran kinerja per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember
Kelimabelas	Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (Lakin) Pusat tepat waktu
Keenambelas	Menyusun dokumen Peta Risiko pada awal tahun dan Mitigasi Risiko triwulanan sebagai kelengkapan Manajemen Risiko Pusat
Ketujuhbelas	Melakukan evaluasi dan reviu Renstra Pusat minimal setahun sekali sebagai bahan untuk melakukan revisi Renstra
Kedelapanbelas	Berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan dan atau pimpinan Pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan, idenfikasi kendala dan strategi, RPD, dan pelaksanaan
Kesembilanbelas	Berkoordinasi dengan tim keuangan dalam rangka pemanfaatan aplikasi molk untuk pemantauan dan optimalisasi nilai IKPA

- 6 -

Keduapuluh	Berkoordinasi dengan tim layanan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Badan dalam rangka pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada Pusat
Keduapuluhsatu	Melaporkan hasil tugas-tugas pelaporan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
Keduapuluhdua	Seluruh laporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran divalidasi dan ditandatangani oleh Kepala Pusat tepat waktu

SK TIM REVIU LAPORAN KINERJA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA**

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telepon: (021) 29099245, 29099247; Laman: spiritpusbanglin.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0085/I2/PR.04.03/2025**

TENTANG

**TIM EVALUASI MANDIRI LAPORAN KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR, DAN MENENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang merupakan unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- b. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/0/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR, DAN MENENGAH TENTANG TIM EVALUASI MANDIRI LAPORAN KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.

KEDUA : Tim Reviu bertugas:

1. memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024 berkualitas; dan
2. menyusun rekomendasi hasil reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.

KETIGA : Masa jabatan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Januari 2025
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Amalia
Dora Amalia

NIP 197107292002122001

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
3. Bendahara Pengeluaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
Keputusan Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 0085/I2/PR.04.03/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim
1.	Dwi Agus Erinita NIP 197208201999032002	Widyabasa Ahli Madya	Pengarah
2.	Eri Setyowati NIP 198102192006042001	Widyabasa Ahli Madya	Ketua Pelaksana
3.	Miranti Sudarmaji NIP 198803142015042003	Widyabasa Ahli Muda	Anggota
4.	Amat Triatna NIP 198212102014041001	Widyabasa Ahli Muda	Anggota
5.	Dzien Nuen Almisri NIP 198707312014041001	Widyabasa Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Januari 2025
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Amalia
Dora Amalia
NIP 197107292002122001

KERTAS KERJA REVIU LAKIN

	Pernyataan	Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

SURAT PERNYATAAN REVIU LAKIN

**Pernyataan Telah Direviu
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 24 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Eri Setyowati